

TERORISME DAN KEKERASAN BERLATAR BELAKANG AGAMA DI JAWA BARAT



**Disusun Oleh:
Sukawarsini Djelantik, Ph.D
Stephani Dania
Amy Nindya
Amelia Maya Irwanti**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, November 2013**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenanNya maka penelitian yang bertajuk: "Terorisme dan Kekerasan berlatar-belakang agama di Jawa Barat" ini berhasil diselesaikan.

Topik ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang mengalami aksi-aksi terorisme dan aksi-aksi kekerasan yang paling banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kekerasan yang berlatar belakang agama tampil dalam berbagai bentuknya, seperti demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, dan atau pembunuhan. Peristiwa seringkali dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Berbeda dengan pelaku-pelaku terorisme yang memiliki organisasi khusus beserta struktur organisasi dan keanggotaan yang rahasia, pelaku-pelaku kekerasan berlatar-belakang agama lebih banyak dilakukan oleh individu-individu yang tergabung ke dalam organisasi-organisasi keagamaan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Ketiga kota ini seringkali mengalami aksi-aksi kekerasan berlatar-belakang agama.

Terimakasih kami sampaikan kepada para mahasiswa program Magister Ilmu Sosial (MIS) pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sebelum dan selama penelitian. Secara khusus, ucapan terimakasih kami tujukan kepada tim peneliti yaitu Stephani Dania, Amy Nindya,

dan Amelia Maya Irwanti. Bantuan juga diberikan oleh alumni program magister Ilmu Sosial, Yuliwati Syarifudin dan Risalatu Mirajiah yang membantu dengan data-data yang diperlukan. Tidak lupa pula kami sampaikan terimakasih kepada Bpk. Nurwaman, Roni Nugraha, dan Ilim Abdul Halim, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, yang membantu dalam pengumpulan data lapangan di Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi. Berkat jaringan yang dimiliki dan keterlibatan dalam proses penelitian lapangan, membuat hasil penelitian menjadi lebih mendalam.

Sangat disadari bahwa hasil penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, segala bentuk masukan maupun kritikan akan diterima dengan tangan terbuka. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik sebagai bahan referensi maupun sebagai bahan masukan agar segala jenis kekerasan dapat diminimalisir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Bandung, 21 November 2013,

Dr. Sukawarsini Djelantik

ABSTRAK

Terorisme dan kekerasan berlatar-belakang agama yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi domestik. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan analisis mengenai ekonomi dan konflik yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan ketidakpuasan dan kekerasan. Agresifitas seringkali dipicu oleh kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi selain karena tidak efektifnya manajemen publik. Dorongan untuk melakukan agresi ini juga diperkuat dengan kecenderungan orang untuk melakukan *glorifikasi*, atau menganggap diri dan golongan sendiri suci, serta menganggap benar ajaran agama sendiri. Kecenderungan ini melahirkan *dehumanisasi* dan *demonisasi*, yang melihat orang lain sebagai *bukan manusia* sehingga wajar bila perlu dimanusiakan dari segi prilaku maupun pemikiran. Kelompok ini melakukan pemaksaan agar orang lain menjadi seperti diri dan kelompoknya. *Demonisasi* berarti *pen-setanan*, melihat orang lain sebagai setan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Islam, yang antara lain menyebutkan menghalalkan pembunuhan terhadap kelompok non-Muslim juga menjadi faktor penyumbang konflik dan terorisme. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah asal dari banyak terjadinya terorisme dan kekerasan berbasis agama. Untuk itulah, penelitian ini difokuskan pada kota-kota di Jawa Barat, terutama yang banyak mengalami aksi-aksi kekerasan seperti Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi. Penelitian untuk melihat faktor-faktor pendorong kekerasan berbasis agama di Jawa Barat serta efektifitas program-program pemerintah selama ini dalam mengatasi masalah ini.

Kata-kata kunci: terorisme, kekerasan berbasis agama, agresivitas, agama Islam, Jawa Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	2
BAB 2. KEKERASAN BERBASIS AGAMA	23
BAB 3. TERORISME DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI BANDUNG	39
3.1. Tinjauan Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah	59
3.2. Protes Terhadap Keberadaan BNKAP Gereja Nias	70
BAB 4. TERORISME DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI TASIKMALAYA	77
BAB 5. TERORISME DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI BEKASI	91
BAB 6. KESIMPULAN	113
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1999, aksi-aksi terorisme di Indonesia semakin marak. Terorisme erat kaitannya dengan isu-isu politik (internasional dan domestik), sesuai dengan tujuan akhir aksi-aksi pelaku. Persaingan politik di tingkat nasional, dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik di Timur Tengah, menjadi faktor-faktor pendorong aksi-aksi tersebut. Selain itu, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Islam, yang antara lain menyebutkan menghalalkan pembunuhan terhadap kelompok non-Muslim juga menjadi faktor penyumbang konflik dan terorisme. Faktor lainnya adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Seberapa besar kemiskinan berpengaruh terhadap peningkatan aksi-aksi terorisme di Indonesia, masih mengundang banyak kontroversi. Para pendukung percaya bahwa kemiskinan menyebabkan keputusasaan dan hilangnya harapan untuk mendapatkan penghidupan dan masa depan yang lebih baik, sehingga memunculkan keinginan memberontak. Posisi kelompok ekonomi bawah ini dikaitkan dengan tekanan politik terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Penelitian ini ingin membahas faktor-faktor pendukung terorisme di Indonesia, dengan mengambil contoh kasus di Jawa Barat. Kemiskinan akan ditinjau dari indikator-indikator ekonomi pada level individu maupun pada level masyarakat. Penelitian lapangan akan dilakukan di Jawa Barat, dengan membandingkan daerah perkotaan dan pedesaan. Waktu penelitian dibatasi pada era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2006-2012).

Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis agama yang marak di Indonesia membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional. Aksi-aksi kekerasan menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain menurunkan

wibawa pemerintah, sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat sejak era reformasi sampai sekarang (2013).

Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode transisi menjadi salah satu negara demokratis yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Fakta tersebut dipertegas setelah terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum yang paling demokratis sejak yang terjadi pada 1955. Akan tetapi, masa reformasi ini juga ditandai dengan maraknya aksi kekerasan, demonstrasi, dan terorisme di sejumlah kota di Indonesia.

Kekerasan berbasis agama merupakan sesuatu hal yang “baru” dalam politik Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, khususnya dari pertengahan 1970-an sampai menjelang kejatuhan Orde Baru, hal ini sangat jarang terjadi. Kekerasan berbasis agama meningkat sejak Mei 1998, terutama pada 2001, seperti terlihat dalam data sebagai berikut: dari Januari hingga Juli, sudah terjadi 81 peristiwa, sementara di ibukota Jakarta terjadi 29 peristiwa, dan selebihnya terjadi di luar Jakarta, seperti di Depok, Bekasi, Yogyakarta, Banten, dan Sulawesi Tenggara (tidak termasuk yang terjadi Aceh atau Papua). Dari tahun ke tahun, Kekerasan berbasis agama makin meningkat. Fakta tersebut seolah membenarkan teori dari Alberto Abadie yang mengatakan bahwa negara yang

tengah mengalami masa transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme.¹

Terorisme dan Kekerasan berbasis agama di Indonesia terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi. Untuk kasus di Indonesia, antara *Islam, kekerasan dan Terorisme*, ketiganya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. bila orang menyebut “Islam” imajinasi selanjutnya akan menuju “kekerasan, jihad, terorisme dan seterusnya”. Meskipun para pemuka agama, pemimpin bangsa-bangsa berkali-kali mengeluarkan bantahan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara agama dan terorisme, namun citra ini tidak begitu saja dapat dilepas karena faktanya pengungkapan aksi-aksi terorisme selalu dihubungkan dengan Islam. Bukti-bukti menunjukkan bahwa para pelaku terorisme menyimpan buku-buku agama Islam, ajaran tentang “jihad”, CD ceramah agama dan sejenisnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap agama Islam bagi sebagian pengikutnya terkait dengan aksi-aksi kekerasan. Sama halnya dengan aksi-aksi terorisme, terutama yang terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah dan berpenduduk mayoritas Islam seperti di Indonesia, aksi-aksi terorisme seringkali dikaitkan dengan ketimpangan global dan proses globalisasi yang melahirkan ketimpangan ekonomi dan ketidakpuasan. Penerapan pasar bebas yang lebih menguntungkan dan semakin memperkaya negara-negara Barat sambil memarginalisasi negara-negara berkembang, memberi andil lahirnya aksi-aksi terorisme global.

Dalam skala global, munculnya terorisme dan Kekerasan berbasis agama tidak dapat dipahami tanpa meninjau sistem internasional yang membantu terciptanya kondisi teror. Sebagai contoh, teroris di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh keberpihakan

¹ Alberto Abadie, 2004, *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No 1085, Oktober 2004.op.cit. hal. 3.

Amerika Serikat yang ditunjang oleh kepentingan nasionalnya yang sangat kuat terhadap Israel dalam konflik yang berkepanjangan dengan Palestina. Selain itu, dominasi Amerika Serikat dan sistem pengambilan keputusan dalam organisasi internasional seperti PBB juga menunjukkan keberpihakan terhadap negara-negara Barat. Kondisi ini telah menimbulkan rasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap efektifitas PBB dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan perang dan damai. Aksi teror kemudian dipilih sebagai alternatif setelah segala upaya ke arah diplomasi dianggap gagal.² Alasan lainnya adalah minimnya pemahaman keagamaan serta klaim sebagai satu-satunya kelompok atau golongan yang benar, menyebabkan cara pandang sempit yang menunjuk kesalahan kepada orang atau kelompok lain. Pemaksaan kehendak dan pemaksaan nilai-nilai seringkali dilakukan dalam bentuk kekerasan.

Mengenai aksi-aksi terorisme yang hadir dan berkembang di Indonesia, antara lain dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara lewat *Jema'ah Islamiyah (JI)*. Kebanyakan pemimpin JI adalah orang Indonesia.³ Aktor yang diduga menjadi pelaku aksi-aksi teror kebanyakan berasal dari dalam negeri. Sejak penangkapan Amrozy, Imam Samudra, dan Muklas, media massa berupaya mengkaitkan informasi berdasarkan laporan polisi, dan menyimpulkan bahwa jaringan individu dan sel yang rumit terlibat dalam serangan Bom Bali.

Pengakuan para pelaku terorisme menegaskan bahwa aksi didukung oleh jaringan yang rapi dan memiliki jumlah anggota yang memadai. Untuk itu, teroris akan selalu

² Djelantik, op.cit, hal. 174.

³ Nasir Abbas, 2005, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta. Lihat juga laporan dari International Crisis Group (ICG), *Jamaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous*, Asia Report N°63 26 Agustus 2003. Lihat di <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1452&l=1>, diakses pada tanggal 19 Maret 2006.

berupaya untuk meningkatkan jumlah anggotanya dengan cara rekrutmen. Pasca ledakan Bom Bali II pada Oktober 2005, aparat keamanan juga mengungkapkan bahwa aksi teror tersebut dilakukan oleh generasi baru.⁴ Pasca penangkapan para pelaku teror di Bali pada 2002, muncul para pemain baru dengan menggunakan cara-cara operasional baru.⁵

Terorisme dan Kekerasan berbasis agama untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan erat satu sama lain. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu politik melalui cara lain. Alasannya karena terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik.⁶

Terorisme dan Kekerasan berbasis agama tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang tengah mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan terdapatnya jurang pemisah yang dalam antara kaya dan miskin. Terorisme diyakini sebagai salah satu bentuk strategi politik dari kelompok yang lemah menghadapi pemerintah yang kuat dan berkuasa. Aktor utama biasanya adalah organisasi politik radikal yang melakukan aksi-aksi revolusioner. Sejak Revolusi Perancis, strategi

⁴ *Teroris Baru, Jaringan Lama*, Majalah Tempo, Edisi 17-23 Oktober 2005.

⁵ Sydney Jones, *Sayap Garis Keras itu Bernama Thoifah Muqatilah*, wawancara dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Oktober 2005, hal. 60-63.

⁶ Sukawarsini Djelantik, 1999, *Teroris Internasional, Aktor Bukan Negara dalam Hubungan Internasional*, dalam Andre Pareira (Ed) *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Parahyangan Center for International Studies, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189.

terorisme seringkali dipakai dan berevolusi sebagai salah satu cara melakukan perubahan politik.⁷

Terorisme dan Kekerasan berbasis agama dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah mencapai keputusan secara kolektif berdasarkan keyakinan yang dipegang bersama, walau komitmen setiap orang terhadap kelompok dan keyakinannya tidak sama. Terorisme yang berorientasi politis melakukan tindakan politik secara perseorangan atas nama bersama dan secara kolektif berusaha membenarkan tindakannya.⁸ Maka terorisme politik adalah suatu gejala yang merupakan perpanjangan dari politik oposisi yang merupakan suatu produk dari proses delegitimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada. Proses ini pada awalnya dilakukan hampir selalu tanpa kekerasan. Kolektivitas teroris seringkali merupakan kelompok elite yang dikepalai oleh para pemuda terpelajar dari kelas menengah atau menengah ke atas dan umumnya mahasiswa atau bahkan lulusan universitas.

Organisasi teroris selalu bersifat elitis dengan perekrutan anggota yang sistematis, pemantauan yang panjang serta selalu bersifat tertutup dan bergerak ‘di bawah tanah’ (rahasia). Aksi terorisme lebih merupakan operasi intelijen, sehingga perlu dibedakan antara organisasi teroris dengan pemberontakan. Pemberontakan selalu tampil dengan perekrutan massal dan umumnya bersifat terbuka meskipun dalam operasi gerilya juga menggunakan taktik gerakan bawah tanah. Terorisme menjadi perang pengganti non-konvensional, sehingga aksi-aksinya tidak memerlukan banyak sumber daya dan dalam

⁷ Richard Clutterbuck, 1987, *Kidnap, Hijack and Extortion*, McMillan, hal. 6-8.

⁸ Walter Reich, ed, (1990), *Origins of Terrorism: Psychologies, Theologies, State of Mind*, Woodrow Wilson International Center for Scholars dan Cambridge University Press, Cambridge.

operasionalnya sangat dekat dengan prinsip-prinsip perang gerilya.⁹ Artinya, kebanyakan sumberdaya diperoleh di daerah ‘musuh’, mulai dari dana (misalnya dengan merampok bank), bahan-bahan material untuk aktivitas kekerasan, dan tempat persembunyian. Sebagai suatu ‘perang’ meskipun tidak konvensional maka tetap persyaratan untuk melakukan aksi teror akan menggunakan prinsip-prinsip perang gerilya kota.

Penelitian mengenai terorisme dan kekerasan berbasis agama diwarnai dengan perdebatan dan kontroversi mengenai kaitan antara kemiskinan dengan terorisme. Pendukung percaya bahwa salah satu penyebab terorisme dan kekerasan berbasis agama adalah kemiskinan. Pendapat semacam ini sesuai dengan analisis mengenai ekonomi dan konflik. Penelitian dari Alesina dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan kudeta politik.¹⁰ Lebih lanjut penelitian dari Collier dan Hoeffler menunjukkan bahwa variabel ekonomi sangat kuat untuk memunculkan perang saudara, sementara variabel politik justru menunjukkan kemampuan yang lebih rendah.¹¹ Penelitian dari Miguel, Satyanath, dan Sergenti yang dilakukan di negara-negara di Afrika mendukung pendapat keduanya dengan menunjukkan bahwa kondisi kemerosotan tingkat perekonomian dapat meningkatkan konflik horisontal atau konflik di antara masyarakat sipil.¹² Karena terorisme adalah manifestasi dari konflik politik, penelitian ini akan meninjau bagaimana kemiskinan dan

⁹ Majalah *TSM: Teknologi & Strategi Militer*, nomor 25 tahun 1989, Jakarta, hal. 10-11.

¹⁰ Alesina, Ozler, Roubini, and Swagel, 1996, *Political Instability and Economic Growth*, Journal of Economic Growth, Vol. I. hal. 189-211.

¹¹ Collier and Hoeffler, 2004, *Greed and Grievance in Civil War*, Oxford Economic Paper, Vol. 56, hal. 563-595.

¹² Miguel, Stayanath and Sergenti, 2004, *Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach*, Journal of Political Economy, Vol. 112 (4), hal. 725-753.

kondisi perekonomian yang buruk memainkan peran yang penting bagi meningkatnya terorisme.

Pendapat-pendapat diatas ditentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Fair dan Shepherd di 14 negara Islam. Fair dan Shepherd menyimpulkan bahwa: “reponden yang sangat miskin dan yang yakin bahwa para pemimpin agama harus memainkan peran yang lebih besar dalam politik”, justru tidak mendukung terorisme.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Krueger, Latini, dan Piazza pada 2003, juga tidak menunjukkan bukti yang mendukung bahwa kemiskinan meningkatkan terorisme. Penelitian Krueger dan Laitin menunjukkan bahwa di antara negara-negara yang memiliki tingkat kebebasan politik yang seimbang, negara yang miskin tidak memiliki teroris, atau mengalami aksi teror yang lebih banyak daripada di negara-negara kaya.¹⁴ Kebalikannya diantara negara-negara yang memiliki tingkat kebebasan politik yang sama, negara-negara yang lebih kaya justru lebih banyak menjadi target serangan teroris transnasional. Penelitian Alberto Abadie yang dilakukan di Irak, Spanyol (Basque), dan Rusia, lebih jauh menentang pendapat bahwa risiko terhadap terorisme tidak secara khusus lebih besar di negara-negara yang lebih miskin, terutama jika pengaruh karakteristik negara lain seperti tingkat kebebasan politik juga diperhatikan.

Abadie secara khusus menentang pendapat Collier dan Hufier yang mengaitkan antara perang saudara dan kemiskinan, dengan mengatakan bahwa rendahnya kebebasan politik ternyata dapat meningkatnya terorisme. Negara-negara yang memiliki kebebasan

¹³ C. Christine Fair dan Bryan Shepherd, 2006, *Who Support Terrorism? Evidence from Fourteen Muslim Countries, Studies in Conflict and Terrorism*, Routledge, Taylor and Francis Group, No. 29 hal. 51-74.

¹⁴ Krueger, A.B dan D.D Laitin, 2003, *Kto Kogo?: A Cross-Country Study of the Origins and Targets of Terrorism*, mimeo, November 2003.

politik sedang menunjukkan lebih rentan terhadap terorisme daripada negara-negara yang memiliki kebebasan politik yang tinggi atau malahan dengan negara-negara yang berada di bawah rezim otoriter.¹⁵ Abadie menyimpulkan bahwa negara-negara yang tengah mengalami masa transisi dari rezim yang otoriter ke arah demokrasi diikuti oleh peningkatan sementara aksi-aksi terorisme.

Dalam konteks Indonesia, Marpaung mengajukan argumentasi bahwa terorisme terjadi karena faktor-faktor seperti kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi selain karena tidak efektifnya manajemen publik dimana kelompok teroris itu berasal.¹⁶ Tujuan akhir dari terorisme adalah menumbangkan rezim lawan yang mungkin terjadi bila ada faktor-faktor lain yang menunjukkan disfungsi sistem sosial yaitu: perekonomian nasional yang tidak sehat, pengangguran yang semakin bertambah sedangkan lapangan pekerjaan tidak bertambah, kesenjangan ekonomi antar-golongan, inflasi yang tinggi, korupsi yang membudaya, dan ketergantungan pada pihak luar yang semakin besar dan sebagainya.¹⁷ Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas teror dan kekerasan lainnya biasanya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok *mainstream* Islam (seperti *Nahdatul Ulama/NU*, Muhammadiyah, atau Persatuan Islam (Persis)). Pelaku teror lebih banyak kelompok-kelompok sempalannya atau yang berada di luar struktur.

Kerangka pemikiran diatas juga menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pendapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan informasi-informasi

¹⁵ Alberto Abadie, 2004, op.cit.

¹⁶ Rusdi Marpaung, op.cit. hal. 25.

¹⁷ TSM No.18, op. cit, hal. 30.

yang diterima melalui media-massa. Dalam kaitan dengan persepsi terhadap ketidakadilan yang diderita misalnya, rakyat Palestina, Irak, atau Afghanistan ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, media massa memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan opini publik.¹⁸

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah asal dari banyak terjadinya terorisme dan Kekerasan berbasis agama. Jawa Barat akan dipakai sebagai sampel dan studi kasus terkait dengan isu-isu politik dan pembangunan ekonomi seperti: tingkat putus sekolah, tingkat pengangguran, ketersediaan lapangan pekerjaan, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, dll. Lebih lanjut, akan ditinjau faktor-faktor agama dan pemahaman akan ajaran-ajaran Islam yang salah diinterpretasikan oleh sebagian masyarakat yang berubah menjadi kelompok radikal. Maka pertanyaan penelitian adalah sbb: *Apa faktor-faktor pendukung terorisme dan kekerasan berbasis agama di Indonesia dalam kasus Jawa Barat?*

Terorisme, Glorifikasi dan Kekerasan Berbasis Agama

Untuk melihat kaitan antara terorisme dan kekerasan berbasis agama, analisis akan diawali dengan fakta bahwa perilaku kekerasan seringkali muncul akibat dorongan psikis dan pada umumnya seringkali berpusat pada pribadi manusia. Dalam syaraf otak seseorang terdapat area yang bisa menghasilkan impuls-impuls yang mendorong orang berbuat kekerasan. Jadi dorongan untuk melakukan kekerasan memang telah menjadi satu dalam diri manusia sebagaimana layaknya rasa cinta. Menurut Sigmund Freud, setiap orang mempunyai insting bawaan untuk berperilaku agresif. Agresi merupakan

¹⁸ Djelantik, op.cit. hal. 187-188. Lihat juga Sukawarsini Djelantik, 2005, *Terorisme dan Media Massa*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. I, No 1, Januari 2005, hal. 14-28.

derivasi insting mati (*thanatos*) yang harus disalurkan untuk menyeimbangkannya dengan insting hidup (*eros*). *Eros* dan *thanatos* ini harus diseimbangkan untuk menstabilkan mental.¹⁹

Faktor penyebab agresi lainnya adalah rasa frustrasi. Frustrasi adalah terhalangnya seseorang oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Teori hipotesis frustrasi-agresi dipelopori oleh lima orang ahli yaitu Dollard, Doob, Miller, Mowrer, dan Sears pada tahun 1939. Pada mulanya mereka menyatakan bahwa dalam setiap frustrasi selalu menimbulkan perilaku agresi. Pada tahun 1941, Miller menyatakan bahwa frustrasi menimbulkan sejumlah respon yang berbeda dan tidak selalu menimbulkan perilaku agresi, perilaku agresi hanya salah satu bentuk respon yang muncul. Watson, Kulik dan Brown menyatakan bahwa frustrasi yang muncul akibat faktor luar menimbulkan perilaku agresi yang lebih besar dibandingkan dengan halangan yang disebabkan diri sendiri. Hasil penelitian Burnstein dan Worchel menyatakan bahwa frustrasi yang menetap akan mendorong perilaku agresi. Dalam hal ini, orang siap melakukan perilaku agresi karena orang menahan ekspresi agresi. Frustrasi yang disebabkan situasi yang tidak menentu (*uncertain*) akan memicu perilaku agresi lebih besar dibandingkan dengan frustrasi karena situasi yang menentu.

Lebih lanjut, Bandura, Baron, dan Berkowitz menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar melalui pengamatan terhadap dunia sosial. Hal ini bertentangan dengan pendapat Sigmund Freud yang menyatakan bahwa sejak lahir setiap individu telah mempunyai insting agresi.

¹⁹ Tinjauan Psikologi-Sosial terhadap Perilaku Agresi. Lihat di: <http://unikunik.wordpress.com/2009/05/03/tinjauan-psikologi-sosial-terhadap-perilaku-agresi/>, diakses tanggal 19 November 2013.

Di Indonesia beberapa waktu lalu ada acara-acara TV yang menyajikan acara khusus perkelahian yang sangat populer seperti Smack Down, UFC (*Ultimate Fighting Championship*) atau sejenisnya. Walaupun pembawa acara berulang kali mengingatkan penonton untuk tidak mencontoh apa yang mereka saksikan, namun diyakini bahwa tontonan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa penontonnya. Pendapat ini sesuai dengan yang diutarakan Davidoff yang mengatakan bahwa menyaksikan perkelahian dan pembunuhan meskipun sedikit pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut.

Teori lain mengenai agresi adalah penilaian kognitif dan kompetisi sosial. **Penilaian Kognitif** menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus itu diinterpretasi oleh individu. Sebagai contoh, frustrasi dapat menyebabkan timbulnya perilaku agresi jika frustrasi itu diinterpretasi oleh individu sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapainya. Sedangkan teori **Kompetisi Sosial** mengacu pada perspektif sosiobiologi, yang menyatakan bahwa perilaku agresi berkembang karena adanya kompetisi sosial terhadap sumber daya. Dalam hal ini satu macam sumber daya yang dipandang terbatas, diperebutkan oleh dua belah pihak. Perilaku agresi menurut perspektif ini merupakan sesuatu yang fundamental karena merupakan strategi adaptasi dalam kehidupan. Dalam pandangan ini manusia diharapkan bertindak agresif ketika sumber daya yang penting itu terbatas, atau mengalami ketidaknyamanan, sistem sosial tidak berjalan dengan baik, dan ada ancaman dari pihak luar. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup.

Dorongan untuk melakukan kekerasan (agresi) ini juga diperkuat dengan kecenderungan orang untuk melakukan *glorifikasi*. *Glorifikasi* secara harfiah berarti

menganggap suci diri sendiri, yang bentuknya bisa beragam, seperti *truth claim*, menganggap benar ajaran sendiri, sambil melegitimasi tindakan dengan ayat-ayat Tuhan. Kecenderungan menganggap suci, ajaran atau keyakinan diri sendiri ini kemudian melahirkan apa yang di namakan *dehumanisasi* dan *demonisasi*.²⁰

Dehumanisasi dalam konteks ini berarti, pandangan yang melihat orang lain sebagai *bukan manusia*, atau *yang selain manusia*.²¹ Mereka yang tidak sama dengan pandangan yang suci tadi lantas diposisikan dalam tingkat kemkhlukkan yang lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu di anggap wajar bila kemudian mereka harus di manusiawikan, baik dari segi prilaku, maupun pemikiran. Dalam konteks inilah sebagian orang yang menganggap pandangan dirinya suci, seringkali melakukan pemaksaan agar orang lain seperti dirinya. *Demonisasi*, sering berarti *pen-setanan*, melihat orang lain sebagai setan. Salah satu contoh paling aktual dari penyetanan ini adalah ungkapan ketua FBR (Forum Betawi Rempug) yang menyebut pada aktivis yang menolak RUU-APP sebagai *Iblis berhati Setan*.²² *Demonisasi* ini berujung pada sikap ingin menghabisi ‘setan’ dengan kekerasan, yang sering dikaitkan dengan ajaran Islam.²³ Ketiga hal inilah yang kemudian melihat *other*, “yang lain” sebagai harus ditakhulkan sesuai dengan “apa yang

²⁰ <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.

²¹ Limas Sutanto dalam *Workshop Rencana Aksi Advokasi terhadap Kekerasan bernuansa agama*, diselenggarakan Jaringan Islam Anti Diskriminasi di Lawang Malang, 7-9 Oktober 2005. Lihat <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.

²² <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.

²³ Murdian, “Glorifikasi, Globalisasi...”, *ibid*.

diyakini”. Terjadi kemudian kecenderungan untuk melakukan agresi, yang bila tidak dikelola secara baik akan berubah menjadi destruktif dan merusak.

Salah satu faktor penyebab agresi adalah lingkungan. Beberapa faktor lingkungan seperti kemiskinan, anonimitas, dan suhu udara yang terlalu panas juga berperan dalam pembentukan perilaku agresi. Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan.²⁴ Terlalu banyak rangsangan indra dan kognitif seperti di kota-kota besar yang menyajikan berbagai suara, cahaya dan bermacam informasi yang besarnya sangat luar biasa membuat dunia menjadi sangat impersonal, artinya antara satu orang dengan orang lain tidak lagi saling mengenal atau mengetahui secara baik. Lebih jauh lagi, setiap individu cenderung menjadi anonim (tidak mempunyai identitas diri). Bila seseorang merasa anonim ia cenderung berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain.

Aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan seringkali terjadi pada cuaca yang terik dan panas, tapi bila musim hujan relatif jarang terjadi peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan laporan *US Riot Commission* yang menyatakan bahwa ketika musim panas, rangkaian kerusuhan dan agresivitas massa lebih banyak terjadi dibandingkan dengan musim-musim lainnya. Hal ini sesuai dengan premis kehidupan biologis manusia, yang menyatakan apabila “kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang dihalangi, maka yang akan muncul adalah sebaliknya, yakni kekuatan perusak yang menghancurkan pelbagai penghalangnya.” Kekerasan dan peperangan seringkali muncul akibat tidak “dihidupinya kehidupan”, yang secara alamiah

²⁴ Tinjauan Psikologi Sosial terhadap Perilaku Agresi, lihat: nikunik.wordpress.com/2009/05/03/tinjauan-psikologi-sosial-terhadap-perilaku-agresi/, diakses tanggal 19 November 2013.

keberagaman tidak diberi tempat yang wajar. Bila energi kehidupan yang mendorong kemajuan dan kemajemukan suatu masyarakat dihalang-halangi, maka kekerasan akan segera terjadi.

Potensi kekerasan ini menjadi problem abadi manusia. Seperti soal rasa aman, kelaparan dan kekurangan makan, masalah seksualitas dan problem-problem sosial lain. Wajar saja kemudian isu kekerasan dan terorisme, menjadi salah satu agenda kemanusiaan universal. Hal ini merupakan keniscayaan, karena bila menggunakan premis diatas, para pelaku tindakan terorisme dan kekerasan sering menjadi korban ketidakadilan, tidak dihidupinya kehidupan, atau setidaknya melakukan kekerasan atas nama simpati atas keadilan yang tak kunjung datang. Argumen lain adalah, kekerasan dan terorisme menjadi kecenderungan manusia modern, yang selalu hidup dalam dualitas yang paradoksial; antara keinginan untuk hidup dalam harmoni, dan kehidupan yang semakin menjadi purba. Hukum *survival of the fittes* tetap dipelihara, ketika yang kuat dan yang dominan tetap menang dan menghisap mereka yang tak beruntung.

Manusia sebagian besar adalah umat beragama, yang menghadapi soal kekerasan, teror dan sebagainya. Apalagi kaum beragama sangat rentan terhadap proses *glorifikasi* yang kadang memunculkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan substansi ajaran yang diyakininya. Jika suatu agama mengajarkan memelihara kehidupan orang lain, seringkali berubah menjadi penghancuran terhadap yang lain.²⁵

Tujuan Penelitian

²⁵ Murdian, Glorifikasi-Globalisasi dan Kekerasan Bernuansa Agama, lihat: <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya terorisme dan Kekerasan berbasis agama di Indonesia, dalam kasus Jawa Barat. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk:

1. Identifikasi faktor-faktor tersebut diatas dapat dijadikan bahan referensi, rekomendasi, dan bahan pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah keamanan dalam negeri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai upaya-upaya penanggulangan terorisme dan kekerasan berbasis agama di Jawa Barat.
3. Penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah (Kemenkopolkumham, Kepolisian, Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, lembaga non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pembangunan masyarakat), maupun pemerintah pusat dan provinsi (Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II, Bappeda) untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. UNPAR, khususnya program pascasarjana, berupa pengembangan ilmu dan kontribusi publikasi jurnal ilmiah dalam level nasional maupun internasional.
2. Dalam jangka panjang, sebagian hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan untuk mengkaji potensi aplikasi lain.

3. Dapat meningkatkan kualitas pendidikan riset bagi para mahasiswa.

Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Djelantik, Sukawarsini, dkk, *Faktor-Faktor Pendukung Aksi Terorisme di Jawa Bagian Barat*, 2006, Laporan Penelitian, Parahyangan Centre for International Studies (PACIS) Universitas Katolik Parahyangan, bekerjasama dengan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), Menkopolhukam Republik Indonesia, Bandung 2006.

Penelitian ini merupakan laporan yang cukup lengkap yang membahas mengenai faktor-faktor pendukung aksi-aksi terorisme di Jawa Barat. Akan tetapi, penelitian ini hanya berakhir pada tahun 2006. Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan kelanjutan, yang meliputi waktu penelitian tahun 2006-2012, yaitu pada era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Penelitian dimaksudkan untuk melihat perkembangan dari aksi-aksi terorisme dan kekerasan berbasis agama yang terjadi di Indonesia, dengan mengambil contoh di Jawa Barat.

Era reformasi pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah melahirkan berbagai kebijakan pembangunan dan perekonomian baru, yang telah melahirkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat, selain semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan. Periode ini juga ditandai dengan krisis perekonomian global pada tahun 2008 yang awalnya terjadi di Amerika Serikat (AS), dan berimbas ke Indonesia. Peristiwa ini secara langsung maupun tidak langsung melahirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa

Barat. Berdasarkan peristiwa tersebut, akan ditinjau bagaimana krisis ekonomi global berpengaruh terhadap peningkatan aksi-aksi terorisme di Indonesia.

2. Djelantik, Sukawarsini, Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan nasional, Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Buku ini menjadi bahan referensi penting dalam meninjau terorisme di Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung meningkatnya aksi terorisme di Indonesia, termasuk pembahasan mengenai kelompok-kelompok teroris Jamaah Islamiyah dan kaitannya dengan kelompok-kelompok teroris lainnya di Kawasan Timur Tengah seperti Al-Qaeda. Kelompok-kelompok tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, membawa pengaruh bagi aktivitas terorisme di Indonesia. Buku ini akan sangat membantu dalam memahami mengapa seseorang menjadi teroris, melalui pembahasan cara perekrutan dan pelatihan yang dijalani.

3. Sukma, Rizal, 2003, *Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12*, dalam Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (Editors), dalam *After Bali, The Threat of Terrorism*, World Scientific dan Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore.

Buku ini membahas mengenai aktivitas kelompok-kelompok radikal Islam pasca peristiwa bom Bali tahun 2002. Buku ini menjadi bahan referensi yang berguna mengingat pembahasan dan analisis terkait dengan keberadaan Jamaah Islamiyah dan kelompok-kelompok lainnya yang beroperasi di Asia Tenggara, seperti kelompok Abu

Sayyaf dan Kelompok Mindanao National Liberation Front (MNLF) di Filipina. Pembahasan sangat bermanfaat untuk mengetahui kaitan antara kelompok-kelompok yang ada di Indonesia dengan jaringan di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

4. Van Bruinessen, Martin (ed), Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2013.

Buku ini membahas bagaimana Islam di Indonesia berubah “sangat” pasca Reformasi. Pembahasan antara lain menjawab persoalan seperti keberadaan jamaah Ahmadiyah yang dianggap sesat, murtad, kafir, dan bukan Islam. Islam pasca reformasi dikenal sebagai Islam yang “marah”. Indonesia berubah dari “smiling Islam”, moderat, progresif, dan liberal, menjadi Islam yang konservatif. Pesan ini tampak pada empat studi kasus para sarjana Indonesia. Moch. Nur Ichwan menelusuri bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) berubah haluan dari khadim al-hukumah (pelayan negara) menjadi khadim al-ummah (pelayan ummat). Tapi “umat disini seperti diidentifikasikan nya sendiri. MUI menjadi organisasi “moderat puritan”.

Meskipun mengecam terorisme, MUI yang dibentuk pada era Soeharto kini melakukan purifikasi tidak hanya atas label makanan (halal/haram), pasar (misalnya sistem keuangan dan perbankan Islam), pikiran (anti-liberalisme, pluralisme, dan sekularisme) dan akidah (anti-ahmadiyah), dan juga moral publik (anti pornografi dan pornoaksi). MUI jadi dekat dengan Islam yang marah karena, sementara mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat, MUI tidak mengecam kekerasan-kekerasan yang terjadi sebagai akibatnya.

Studi dari Ahmad Najib Burhani membahas naiknya konservatisme yang terjadi di Muhammadiyah. Hal ini menyebabkan peran anak-anak muda yang berpikiran progresif, juga umumnya kalangan perempuan, makin terpinggirkan. Memudarnya keramahan Islam juga tampak dari makin populernya sejumlah peraturan daerah (perda) bernuansa Syariah. Ini antara lain dimotori Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Gerakan ini seperti mendapatkan momentum baru berkat tersedianya demokrasi pada era reformasi. Naiknya “Islam yang marah” tampak di Surakarta, Jawa Tengah yang terkait dengan pesantren Ngruki. Radikalisme Islam dibawah kepemimpinan Abu Bakar Baasyir membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan tegaknya negara Islam.

Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data

Metoda penelitian yang dipakai adalah deskriptis analisis dan metoda eksplorasi dan partisipatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi dokumen, dan wawancara langsung dengan narasumber baik pelaku kekerasan berbasis agama maupun korban. Diberberapa tempat dilakukan kegiatan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), untuk menggali informasi yang diperlukan.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Lokasi dipilih berdasarkan studi awal yang menyatakan bahwa kota-kota tersebut memiliki tingkat kekerasan yang berlatarbelakang agama yang tinggi. Studi awal yang dimaksud adalah laporan dan publikasi media-massa selama periode penelitian (2008-2012), dan pengalaman langsung dari para peneliti.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan sebagai berikut:

Bab 1, pendahuluan. Membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metoda penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab2, membahas mengenai “Konflik Agama, Problem Identitas dan Batas Kultural”. Tinjauan teoritis mengenai konflik agama yang dikaitkan dengan problem identitas dan budaya.

Bab3, 4, dan 5 berupa laporan penelitian lapangan mengenai Kekerasan Berbasis Agama, dengan mengambil studi kasus di Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi.

Bab 5, kesimpulan.

BAB II

KONFLIK AGAMA; PROBLEM IDENTITAS DAN BATAS KULTURAL

Latar Belakang

Isu-isu yang berkaitan dengan sensitivitas agama dan etnisitas dapat ditelusuri ke belakang pada munculnya kesadaran kesukuan dan kebudayaan setiap kelompok masyarakat. Perang suku di benua Afrika, pemusnahan sistematis suku Indian di Amerika, nasib umat Islam di negara-negara bekas Uni Sovyet, peperangan agama sepanjang sejarah, klaim atas wilayah teritorial di Timur Tengah, konflik perbatasan atas dasar jumlah pemeluk agama di suatu wilayah seperti di India dan Pakistan, superioritas ras di sepanjang sejarah dunia menjadi bukti munculnya isu multikulturalisme dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah Islam klaim atas hak kepemimpinan antara kaum Muhajirin dengan Anshar, antara Quraisy dengan non-Quraisy, dan *ahl al-bayt* dengan bukan *ahl al-bayt*, menunjukkan munculnya sentimen kekelompokan di antara mereka.²⁶

Dari pengalaman mereka dapat dipelajari bahwa kesadaran kultural pada setiap kelompok masyarakat telah ada sejak dahulu dan menjadi bagian dari politik identitas. Politik identitas ini penting bagi kelanggengan eksistensi kelompok, kontinuitas generasi,

²⁶ Lihat Nadirsyah Hosen, "Proses Terpilihnya Abu Bakar" dalam <http://media.isnet.org/Isnet/Nadirsyah/abubakar.html>.; Thoriq, "Alih Kepemimpinan ala Khulafa' ar Rasyidin," dalam Suara Hidayatullah Mei 2009 <http://majalah.hidayatullah.com/?p=350>. Pada ketiga sumber ini diuraikan bagaimana perselisihan pendapat di kalangan para shahabat mengenai orang yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Dalam sejarah Islam masa awal peristiwa ini dikenal dengan pertemuan di Saqifah Bani Saidah. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik untuk memilih dan menentukan siapa orang yang paling berhak dan paling layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah saw. Mengenai pandangan ahl al-Bayt lihat "Syi'ah dan Dakwah Nabi SAW" http://pemudaahlulbait.multiply.com/journal/item/3/KEMELUT_KEPEMIMPINAN_SELEPAS_RASULULLAH.

hak atas wilayah, bahkan bagi kekuasaan. Ketika suatu kelompok berhadapan dengan kelompok kebudayaan lainnya yang berbeda, politik identitas muncul. Latar kebudayaan masing-masing akan muncul secara dominan dalam membangun identitas tersebut dan jelas hal ini akan dipertahankan. Karena itu, di samping aspek kodrati manusia, kebudayaan merupakan sesuatu yang penting dan sentral.²⁷

Fredrik Barth menjelaskan bahwa ketika suatu kelompok menunjukkan identitas kekelompokannya, sementara anggota-anggotanya berinteraksi dengan anggota dari kelompok lain, maka hal ini menandakan adanya suatu kriteria untuk menentukan keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Hal ini merupakan cara untuk menandakan mana yang anggota kelompoknya dan mana yang bukan. Berbagai cara digunakan untuk mempertahankan kelompok ini, bukan dengan cara sekali untuk seterusnya, tetapi dengan pengungkapan dan pengukuhan yang terus menerus.²⁸

Hal itu menunjukkan bahwa setiap kelompok cenderung mempertahankan identitasnya. Dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, anggota sebuah kelompok akan menunjukkan dan mempertahankan identitasnya. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi kelompok agar tidak larut dan musnah. Pertahanan identitas dengan sendirinya akan membentuk batas kultural (*cultural boundaries*). Suatu kelompok budaya hanya dikenal sebagai sebuah unit bila kelompok tersebut memperlihatkan perilaku yang khas dan berbeda. Kelompok yang tetap mengadakan kontak budaya tidak hanya

²⁷ Lihat Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), cet. Ke-5, hlm.. 317-318.

²⁸ Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI-Press, 1988) penerjemah Nining I. Soesilo, cetakan pertama, hlm. 16.

menunjukkan adanya kriteria dan tanda untuk identifikasi, tetapi juga membentuk struktur interaksi yang memungkinkan menetapkan perbedaan-perbedaan budaya.²⁹

Kesetaraan, Toleransi, dan Batas-batasnya

Karena kesamaan dan perbedaan adalah sesuatu yang niscaya, maka segala upaya untuk menciptakan keseragaman dan kesamaan adalah sia-sia. Pengalaman Indonesia pada masa lalu telah berujung pada antiklimaks dengan munculnya politik identitas kelompok primordial. Munculnya partai-partai politik berbasis agama, tuntutan pembentukan provinsi baru berdasarkan ciri budaya dan kedaerahan, konflik SARA adalah beberapa contoh yang dapat disebut. Karena itu, dapat dimengerti jika Parekh tidak setuju terhadap prinsip kesetaraan dalam keseragaman atau kesamaan. Tentang hal ini ia menjelaskan sebagai berikut:

”Kita tidak dapat mendasarkan kesetaraan dalam keseragaman manusia karena keseragaman tidak terpisahkan dan secara ontologis tidak lebih penting dari keberbedaan manusia. Membumikan kesetaraan dalam keseragaman juga mengandung konsekuensi yang tidak menguntungkan. Dasar itu menuntut kita untuk memperlakukan manusia dengan setara dalam penghormatan dimana mereka serupa dengan kita dan bukan dalam hal-hal di mana mereka berbeda dengan kita. Sembari mengakui kesetaraan dalam tataran manusia, kita menolak kesetaraan pada tataran budaya.... Suatu teori kesetaraan yang

²⁹ Ibid., hlm. 17.

mendasarkan pada keseragaman manusia bersifat tidak koheren secara filosofis dan problematis secara moral”.³⁰

Kesetaraan memiliki batas-batas yang jelas sehingga tidak bisa menjadi keseragaman. Batas-batas tersebut dibangun oleh tradisi, pengalaman, kepentingan, keyakinan atau agama, dan oleh lainnya yang dipandang penting bagi pelestarian eksistensi kelompok. Sesekali mereka bisa saling menembus tanpa kehilangan identitas unik masing-masing. Oleh karena itu, memelihara dan mengembangkan batas-batas kultural, termasuk batas-batas berdasarkan agama bukanlah suatu kesalahan. Ketika batas-batas kultural diciptakan dan dipelihara, maka tercipta pula toleransi dalam rentang batas-batas tersebut demi menjaga eksistensi, identitas, dan keunikan suatu kelompok budaya.³¹

Tentu tidak mudah memperlakukan manusia secara adil dan proporsional ketika disana ada perbedaan dalam persepsi, posisi, peran, wewenang, dan dominasi kultural maupun posisi politis pada salah satu kelompok tertentu dan perlakuan diskriminatif dari kekuasaan terhadap setiap potensi. Kekhawatiran seperti di atas diungkapkan oleh Louis J. Hammann:

“One thing is certain: The human community is a fragile construct indeed. In how many ways can it be broken and divided against itself? The question is rhetorical,

³⁰ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism...*, hlm 218.

³¹ Secara teoretik agama bukan hanya merupakan suatu sistem keyakinan dan praktek, tetapi juga faktor formatif identitas. Studi tentang etnisitas menunjukkan bahwa loyalitas dan ikatan keagamaan merupakan unsur yang kuat dalam membangun identitas etnik, bahkan bagi orang-orang yang kurang taat sekalipun. Ketika suatu kelompok mempersepsikan dirinya terancam, maka ia akan melihat kelompok yang mengancam itu sebagai musuh. Lihat Ajat Sudrajat, “Konflik “Agama” di Kota Jerusalem: Tinjauan Historis,” *Tajdid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan*, Vol. 16 Nomor 2, September, 2009, hlm. 331.

of course, since no one would presume actually to count the ways. Still, the opportunities for intolerance and hostility that plague the human species have elicited remarkable ingenuity among us. On the intra-human level, variations of gender, color, ethnicity, age, size, and intelligence inflict upon each of us suspicion of others. Class, nationality, and religion are some of the gross differences that turn us against each other. Tolerance, it seems, is not one of our spontaneous virtues.”³²

Kekhawatiran Hammann bukan tanpa alasan. Parekh, misalnya, mencontohkan gereja Anglikan yang menempati posisi istimewa di Inggris. Dua uskup agung dan 24 uskup duduk di House of Lords. Gereja mempunyai hak menyelenggarakan upacara kenegaraan dan upacara kerajaan. Inggris juga memiliki Undang-undang yang melarang penghinaan terhadap agama Kristen.³³ Kelompok agama lainnya yang memperoleh fasilitas dan dukungan adalah pemeluk Katolik dan orang Yahudi. Umat Islam, sejauh ini tidak pernah menikmati fasilitas seperti itu.

Parekh menjelaskan bahwa sebagai buntut kasus Salman Rushdie³⁴, pemeluk non-Kristen, terutama Islam, mengeluhkan sikap gereja dan undang-undang anti penghinaan

³² Louis J. Hammann dan Harry M. Buck eds. *Religious Traditions and the Limits of Tolerance* (Chambersburg, Pennsylvania: Anima Publication, 1988), hlm 2-3. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa meskipun toleransi itu merupakan sesuatu yang mulia (*virtue*), tapi toleransi ada batasnya, yang dibangun oleh manusia sendiri atas penafsiran eksklusif terhadap yang suci.

³³ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism...*, hlm 340. Bentuk-bentuk diskriminasi tampaknya dilegitimasi di Inggris dan mungkin di beberapa negara lain di Eropa seperti Perancis dan Yunani. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad selalu ditolelir atas nama hak kebebasan berpendapat. Pelakunya tidak pernah benar-benar dituntut dan diadili. Yang terjadi hanya berupa kecaman dan pernyataan penyesalan atas peristiwa-peristiwa tersebut.

³⁴ Penghinaan Rushdie bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada isteri-isterinya. Pada Bab ‘Return to Jahilia’, (357-394), ia menceritakan adanya sejumlah “whores” (pelacur) di sekeliling “Mahound” dengan nama isteri Nabi, seperti the fifteen year old ‘Ayesha’, the oldest fattest whore ‘Sawdah’, ‘Umm Salamah’, the whore ‘Hafsah’, ‘Zainab’, dan sebagainya. Sangat mudah menebak maksud Rushdie dengan ungkapan-ungkapannya itu. Lihat Salman Rushdie, *The Satanic Verses* (New York, USA: Viking Penguin, 1989).

yang mengistimewakan Kristen dan memperlakukan mereka secara tidak sederajat.³⁵ Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak mudah membangun kesetaraan secara jujur, adil, dan terbuka, bahkan di negara-negara yang mengklaim sebagai negara yang paling menjunjung tinggi HAM, kesetaraan, dan pluralisme. Gambaran di atas juga menjelaskan bahwa ada batas-batas yang harus dijaga.

Inggris seperti juga Perancis, telah menciptakan batas kesetaraan berdasarkan agama, khususnya terhadap pemeluk Islam di kedua negara tersebut. Parekh melihat kemustahilan terjadinya perubahan penting dan mendasar dalam sikap Inggris terhadap agama-agama non-Kristen. Oleh karena itu ia mengajukan usul sangat realistis bagi pemeluk agama non-Kristen di Inggris bahwa mereka tidak perlu menuntut berlebihan dalam perlakuan dan pengakuan terhadap agamanya oleh pemerintah Inggris. Umat non-Kristenpun harus dapat menerima pemberian status istimewa bagi agama Kristen oleh pemerintah Inggris. Menurut Parekh, agama Kristen di Inggris sepantasnya tetap bisa menjadi unsur sentral identitas kolektif Inggris, asalkan agama-agama lainnya menerima pengakuan yang –meski tidak harus setara- memadai dan mewakili lembaga-lembaga.³⁶

Pendapat Parekh tentang Anglikan di Inggris bisa juga ditunjukkan oleh umat beragama di Indonesia. Mereka harus memperlakukan dan menempatkan setiap pihak secara proporsional agar ruang dialog menjadi semakin terbuka. Islam di Indonesia telah

³⁵ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism...*, hlm. 331, 336, dan 341. Untuk kasus di Perancis Parekh menjelaskan bahwa karena dianggap bertentangan dengan peraturan (*laïcité*) sekolah negeri Perancis, kepala sekolah negeri menolak murid berjilbab. Sedangkan mengenai bantuan dana, sekolah muslim tidak memperoleh bantuan karena dianggap menjadi tempat pelestarian gagasan-gagasan reaksioner dalam fase fundamentalisme dewasa ini.

³⁶ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism...*, hlm. 343. Beberapa contoh dikemukakan misalnya perwakilan agama lain dapat ditunjuk masuk ke dalam Majelis Tinggi bersama Uskup Anglikan, upacara kenegaraan diperluas hingga ke unsur non-Kristen, dan pimpinan kerajaan dapat mengayomi festival-festival dan perayaan-perayaan non-Kristen.

memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas masyarakat Indonesia seperti Kristen membentuk identitas warga Inggris. Jika ada prioritas-prioritas dan perbedaan peran dalam konteks struktur pemerintahan dan negara, maka hal itu tidak harus dikesani sebagai perlakuan tidak setara terhadap agama non-Islam, dan warga non-Muslim diharapkan dapat menerimanya.

Etnisitas (*Ethnicity*) sebagai Akar Konflik

Definisi kelompok etnik dari Max Weber masih banyak dirujuk dan masih dianggap relevan karena menunjukkan *universal characteristics* dari suatu kelompok etnik di manapun, yaitu:

“ethnic groups” those human groups that entertain a subjective belief in their common descent because of similarities of physical type or of customs or both, or because of memories of colonization and migration; this belief must be important for the propagation of group formation; conversely, it does not matter whether or not an objective blood relationship exists.³⁷

Richard D. Alba menambahkan ciri-ciri kelompok etnik tersebut lebih rinci yaitu:

... the same or similar geographic origin, language, religion, foods, traditions, folklore, music, and residential pattern. Also typical are: special political concerns, particularly with regard to a homeland; institutions (e.g. social clubs) to serve the group; and a consciousness of kind or a sense of distinctiveness from others.³⁸

³⁷ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, edited by Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978) cet 9, hlm. 389.

³⁸ Richard D. Alba, “Ethnicity” dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta (eds.), *Encyclopaedia of Sociology* (New York: MacMillan Publishing Company, 1992), cet. 10, hlm. 575.

Ketika berbicara tentang definisi etnik, Barth menegaskan pentingnya pengambilan asumsi bahwa mempertahankan batas etnik akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti perbedaan ras, budaya, dan bahasa. Tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budayanya dalam kondisi terisolasi yang disebabkan oleh faktor ekologi yang mendorong berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta. Kondisi seperti ini telah menghasilkan berbagai bangsa yang berbeda-beda dengan budayanya sendiri.³⁹ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sentimen etnisitas senantiasa muncul sebagai suatu naluri mempertahankan diri dan menegaskan identitas kelompok dalam masyarakat.

Isu ras yang tetap menonjol hingga kini adalah di AS. Meskipun AS termasuk yang paling depan dalam kampanye multikulturalisme, akan tetapi di dalam negerinya sendiri konflik berlatar ras sering tidak dapat diselesaikan. Kasus-kasus kekerasan terhadap warga kulit hitam adalah di antara persoalan yang paling memalukan bagi negara pelopor multikulturalisme ini. Organisasi Ku Klux Klan masih banyak pendukungnya dari kalangan kulit putih. Suku Indian, yang memiliki ciri fisik yang relatif berbeda dengan pendatang, masih sering mengalami perlakuan diskriminatif dari warga kulit putih yang dominan.

Konflik berlatar ras biasanya didasarkan kepada prasangka, stereotip, atau diskriminasi. Di Indonesia hingga kini masih melekat prasangka dan stereotip terhadap orang yang berlatar etnis dan kultur yang berbeda.⁴⁰ Tentang prasangka, Parekh

³⁹ Fredrik Barth, *Kelompok etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI-Press, 1988), cet. pertama, hlm. 12.

⁴⁰ Lihat M. Ainul Yaqin *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm 19. Ada banyak prasangka dan stereotip baik yang berkonotasi negatif maupun positif yang diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, misalnya kepada orang Tionghoa, orang Batak, orang Bugis, orang Sunda, orang Jawa, orang

menyebutnya sebagai fitnah komunal.⁴¹ Hal ini merendahkan kedudukan sosial individu terkait dan menghinakan mereka di depan mata mereka sendiri.

Agama sebagai Akar Konflik

Agama diyakini pemeluknya sebagai sumber nilai. Ia berisi aturan-aturan normatif yang menjadi standar perilaku bagi pemeluknya. Simbol-simbol, mitos, keyakinan teologis, dan ideologi agama merupakan sumber kebudayaan yang berpengaruh kuat terhadap pola interaksi antar kelompok masyarakat. Kuatnya keyakinan dalam membentuk kepribadian, cara pandang, ideologi (*worldview*) manusia yang merefleksikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam banyak hal dapat melebihi kekuatan pengaruh kebudayaan lainnya.

Atas dasar keyakinan atau agama, seseorang siap melakukan bunuh diri, membunuh, dan ikut berperang. Slogan 'jihad' cukup efektif untuk menggerakkan seorang pemeluk Islam untuk berperang melawan kekafiran atau melakukan pengorbanan secara sungguh-sungguh demi tegaknya agama Islam. Agama juga mengatur model hubungan antar manusia berdasarkan landasan wahyu sehingga tercipta batas-batas hubungan sosial antar kelompok agama yang berbeda.

Dalam pola hubungan tersebut ada batas-batas yang jelas didasarkan kepada teks al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi mengenai etika hubungan antar umat berbeda agama. Tata aturan tentang hubungan antar umat Islam dengan non-Muslim sering disalahpahami sebagai eksklusivitas dan sering tidak dapat diterima bahkan orang Muslim sekalipun,

Minang (Padang) dan sebagainya. Prasangka dan stereotip tersebut sering mengganggu komunikasi dan interaksi antar kelompok berbeda latar budaya.

⁴¹ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism...*, hlm. 411.

yang disebabkan oleh perbedaan paradigma atau cara pandang (*worldview*) yang dimiliki mereka.

Dari perbedaan cara pandang tersebut muncullah kelompok-kelompok secara dikotomis. Dari penyikapan dikotomis ini muncullah istilah-istilah skismik Islam inklusif – Islam eksklusif, Islam tradisional - Islam modernis, Islam fundamentalis – Islam liberal, dan sebagainya. Pelabelan skismik seperti ini tidak pernah dapat menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya telah menciptakan fragmentasi di kalangan umat Islam yang mengarah kepada konflik. Ironisnya pelabelan seperti itu sering dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki terciptanya suasana damai di kalangan umat beragam agama atau masyarakat multiagama seperti para penggagas dan pendukung multikulturalisme.⁴²

Ketika agama dan pemeluk agama sudah dikelompokkan sedemikian rupa melalui label-label yang diterapkan kepada mereka, hal itu dengan sendirinya akan mempertajam *ingroup* – *outgroup* kelompok satu agama. Setelah itu, kemudian tercipta jarak yang makin lebar dan batas-batas interaksi yang semakin tegas yang dibangun berdasarkan ciri-ciri eksklusif masing-masing. Dengan demikian jelas, pihak-pihak yang memberi label terhadap umat beragama dengan label-label dikotomik seperti dikemukakan di atas turut andil memperburuk suasana hubungan antar umat beragama di Indonesia.

⁴² Fundamentalisme juga muncul dalam agama Kristen Protestan. Anshon Shupe dan Jeffrey K. Hadden menjelaskan istilah fundamentalisme dalam konteks Protestan di AS bahwa “Fundamentalism is a term most commonly associated with a type of conservative Christianity that developed out of a liberal-conservative split in American Protestant evangelicalism during the early years of the twentieth century.” Lihat Jeffrey K. Hadden and Anson Shupe, *Secularization and Fundamentalism Reconsidered*, vol III dari seri *Religion and the Political Order* (New York: Paragon House, 1989), hlm. 109. Istilah gerakan fundamentalisme diambil dari seri buku 12 jilid berjudul *the Fundamentals* yang terbit antara tahun 1910-1915. Seri buku ini berisi artikel-artikel yang mempertahankan argumentasi bahwa kitab suci terbebas dari kesalahan (*biblical inerrancy*) dan menyerang kejahatan modernisme sekuler. Seri buku ini telah menjadi penjaga gawang bagi upaya yang dilakukan oleh Kristen konservatif untuk menegaskan kembali kebenaran dan doktrin yang dianggap telah terkikis dan menghadapi bahaya. Artikel-artikel dalam buku tersebut menjadi rujukan simbolik bagi identifikasi “gerakan fundamentalis”. Lihat juga Jeffrey K. Hadden, “Religious Fundamentalism”, dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta (eds.), *Encyclopaedia of Sociology* (New York: MacMillan Publishing Company, 1992), cet. 10, hlm. 1637-1641.

Mayoritas – Minoritas: Realitas yang Dipermasalahan

Studi-studi mengenai kelompok minoritas *vis a vis* mayoritas sering bermuara pada tuduhan terhadap kelompok mayoritas secara kuantitatif yang dianggap memperlakukan kelompok minoritas secara diskriminatif (*blaming the majority*). Gambaran dan opini yang sering muncul adalah bahwa kelompok minoritas merasa terancam eksistensinya karena memperoleh perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Akibatnya, opini menjadi tidak seimbang antara hak minoritas dan hak mayoritas di mana perhatian lebih sering tertuju kepada hak-hak minoritas yang harus dilindungi. Padahal, mayoritas dan minoritas di suatu negara atau lingkungan masyarakat merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipersalahkan.

Karena itu studi multikulturalisme seharusnya bukan hanya menyangkut hak-hak minoritas dan kelompok tertindas, tetapi juga hak-hak kelompok mayoritas dan kelompok dominan. Studi multikulturalisme bukan studi tentang orang lain (*others*), tetapi studi tentang keragaman kebudayaan untuk semua orang. Manning dan Baruth melihat adanya miskonsepsi seperti itu dalam pendidikan multikultural. Dengan mengutip pandangan James A. Banks, mereka mengemukakan:

Misconception 1: Multicultural education is for others. Some people argue that multicultural education is an entitlement program and a curriculum movement for African Americans, Hispanics, the poor, women, and other victimized groups. Bank considers this belief to be misconception. In fact, multicultural education as designed during the 1980s calls for a restructuring of educational institutions so that all learners will acquire the knowledge, skills, and attitudes necessary to function effectively in a culturally diverse nation. Rather than focusing only on specific gender and ethnic movements, multicultural education

tries to empower all students to become knowledgeable, caring, and active citizens.⁴³

Untuk kasus Indonesia, isu mayoritas – minoritas yang paling menonjol adalah pada kasus-kasus ras (tionghoa) dan agama, yaitu Islam berhadapan dengan pemeluk-pemeluk agama non-Islam di daerah mayoritas Islam, atau sebaliknya minoritas muslim berhadapan dengan mayoritas non-muslim di daerah lainnya. Dalam Islam, kelompok Sunni dianggap sebagai kelompok mayoritas berhadapan dengan kelompok Syi'ah sebagai minoritas. Dalam kelompok *Sunni* ada kelompok pembaharu dan kelompok tradisional di mana yang terakhir dianggap sebagai kelompok mayoritas. Begitu seterusnya.

Hendropuspito menempatkan tema mayoritas – minoritas di bawah topik agama dan konflik sosial. Rupanya ia juga terjebak pada posisi *blaming the majority* ketika ia menempatkan pemeluk agama mayoritas sebagai ancaman dan ketidakseimbangan jumlah tersebut dipandang sebagai potensi konflik.

Untuk Indonesia harus diakui bahwa agama sebagai sumber perselisihan secara prinsip sudah dibendung oleh Pancasila sebagai haluan negara dan Undang-Undang Dasar 1945

“.... Namun akibat dari kelemahan dan keterbatasan manusia – seperti dalam bidang yang lainpun, - pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan prinsipnya. Sifat-sifat negatif mayoritas muncul bukan hanya di bidang politik (kenegaraan), tetapi

⁴³ M. Lee Manning and Leroy G. Baruth, *Multicultural education for Children and Adolescents*. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), second edition, hlm. 7-8. Banyak peneliti yang melihat pendidikan multikultural semata-mata sebagai upaya untuk membela hak-hak kelompok minoritas. Buku-buku yang ditelaah pada Bab 1 penelitian ini hampir seluruhnya mempunyai kecenderungan seperti ini. Demikian halnya buku kumpulan tulisan yang diedit Hikmat Budiman berjudul *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*, (Jakarta: Interseksi Foundation, 2009) adalah semata-mata buku yang menegaskan pembelaan terhadap kelompok minoritas.

juga dalam bidang keagamaan. Di lain pihak minoritas bukan hanya menjadi korban tetapi tidak jarang juga menjadi penyebab dari timbulnya perbenturan.”⁴⁴

Penjelasan Hendropuspito tidak memberi solusi akan tetapi semakin mempertajam potensi konflik, terlebih lagi ketika ia mengemukakan:

Dalam mayoritas keagamaan yang mengembangkan suatu ideologi yang bercampur dengan mitos yang penuh emosi, di mana kepentingan keagamaan dan kepentingan politik luhur dalam satu kesatuan, di situ akan bertumbuh suatu keyakinan bahwa kelompok mayoritas inilah yang dipanggil sebagai suatu kekuatan yang tak terkalahkan dan satu-satunya yang berkuasa untuk menentukan dan menjaga jalannya masyarakat. Semua minoritas harus ditundukkan kepada keinginan mayoritas. Usaha-usaha yang bersangkutan dengan kepentingan minoritas harus minta persetujuan dari mayoritas. Tetapi kelompok mayoritas boleh bertindak semaunya tanpa diperlukan izin dari minoritas, jika mayoritas hendak mengadakan usaha untuk kepentingannya sendiri. Misalnya dalam hal pengadaan sarana-sarana dasar (pembangunan rumah ibadat, gedung sekolah, rumah sakit, dll.).⁴⁵

Tuduhan yang bernada melecehkan golongan mayoritas dalam pembelaan terhadap minoritas lebih lanjut dikemukakan oleh Hendropuspito sebagai berikut:

Kalau ditinjau dari dekat golongan mayoritas yang merasa berkuasa itu ternyata tergantung dari sejumlah kecil orang yang terdiri dari pemimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir, sedangkan bagian terbesar lainnya terdiri dari orang-orang kurang berpendidikan, namun bermodal fanatisme yang kuat, serta orang-orang yang sama sekali tidak menikmati pendidikan humaniora yang wajar.⁴⁶

Karena konteksnya adalah agama, maka yang dimaksud golongan mayoritas di Indonesia oleh Hendropuspito adalah umat Islam. Pernyataan seperti di atas jelas tidak memberi solusi atas persoalan mayoritas – minoritas di Indonesia, akan tetapi justru sebaliknya.

⁴⁴ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius – BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 165.

⁴⁵ Ibid., hlm. 166.

⁴⁶ Ibid.

Refleksi

Sering kali ada penyangkalan jika konflik antar umat beragama disebabkan oleh agama atau keyakinan antar kelompok yang bertikai. Alasan yang sering dimunculkan adalah bahwa agama hanya mengandung unsur-unsur kebaikan universal, tidak mungkin ia mengundang pertikaian. Penyangkalan seperti ini sebenarnya merupakan penyangkalan terhadap adanya perbedaan konsep tentang kebenaran pada setiap agama. Dan, penyangkalan seperti ini, pada gilirannya, hanya akan mengabaikan unsur-unsur penting dan mendasar dalam upaya menciptakan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat yang plural.

Karena itu, jika masih terdapat ketidaksiapan secara jujur dan terbuka untuk bersama-sama berbicara masalah-masalah fundamental dari setiap agama, maka upaya menciptakan harmoni sosial antar umat beragama tidak akan sepenuhnya berhasil dan tidak dapat menghindari terjadinya konflik antar umat beragama maupun intern umat beragama yang berbeda faham dan pemikiran. Setiap ada peluang, terlebih jika dibarengi dengan terjadinya krisis-krisis sosial, maka konflik tersebut muncul ke permukaan sehingga menimbulkan krisis multi-dimensional.

Tampaknya ada juga keraguan disemua pihak untuk mulai berani berbicara perbedaan-perbedaan dalam masalah aqidah (teologis), ideologi, doktrin, dan sebagainya yang sifatnya mendasar dalam setiap agama. Padahal berdiskusi tentang masalah-masalah teologi, ibadah, kemasyarakatan, dan aspek-aspek lain dalam agama sesungguhnya dapat mengantarkan semua pihak kepada suatu pengertian (*understanding*) dan tidak saling menghakimi. Harmoni sosial dapat diwujudkan apabila semua orang dapat saling mengetahui dan memahami posisi dan kewajiban setiap pihak.

Sebaliknya, yang terus terjadi adalah *accusation*, saling tuduh bahwa agama atau pemahaman orang lain sebagai biang keladi atas problem yang terjadi. Di samping itu, upaya dialog ternyata hanya dilakukan di tingkat elite, padahal konflik terbuka terjadi di tingkat grassroot. Lebih dari itu, dialog antar umat beragama dengan pemerintahpun tidak diformulasi sedemikian rupa dalam posisi setara. Yang terjadi adalah pemerintah lebih dominan, menganggap dirinya lebih tahu persoalan, dan tidak mendengar suara arus bawah tetapi lebih sering “memerintah”. Dialog dengan demikian menjadi tidak seimbang dan tidak menghasilkan gagasan baru.

Kita juga melihat ada dua cara yang tengah ditempuh. Penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Jangka Pendek bentuknya penanggulangan (misalnya oleh BNPT [untuk terorisme] dan aparat kepolisian), dan dialog antar kelompok bertikai. Sayang sekali, cara penanggulangan yang dilakukan tetap dengan cara-cara yang standar, kurang kreatif, membuat takut, tapi tidak membuat jera. Sehingga begitu pasukan patroli balik kanan menuju markas, peristiwa terjadi lagi. Jika terus diawasi, pasti mahal *costnya* dan tidak efisien. Sementara itu, dialog yang sering dilakukanpun hanya melibatkan elite agama atau tokoh masyarakat. Padahal yang terlibat dalam pertikaian dan menjadi korban adalah kelompok masyarakat bawah.

Kita bisa mencobakan tiga cara lagi untuk penanggulangan jangka pendek: (1) “Dialog” dalam berbagai bentuknya di tingkat akar rumput dengan pesertanya adalah anggota masyarakat di arus bawah khususnya di lingkungan pelaku kekerasan; Dialog dimaksud berbentuk obrolan santai, informal, dan akrab. Bukan dalam suatu forum seminar yang kaku dan menegangkan; (2) Penanggulangan konflik oleh aparat dengan pendekatan yang lebih humanis, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,

dan menghindari ‘terror’; dan (3) Dialog setara antar pemerintah dan masyarakat di mana pemerintah benar-benar lebih banyak mendengar gejolak arus bawah (*to listen*) ketimbang terus “memerintah”. Untuk yang ketiga ini “baju” pemerintahnya perlu ditanggalkan dulu dan mereka larut dalam suasana persaudaraan secara setara, banyak mendengar dalam suasana santai di tempat yang kondusif.

Menyelenggarakan model dialog seperti ini (1 dan 3) mesti lebih banyak melibatkan masyarakat, bukan hanya tokoh masyarakat, dan fasilitator dari kalangan perguruan tinggi, dan tentunya *cost*-nya akan lebih mahal. Tidak apa-apa jika hasilnya bisa menjadi lebih berarti.

Untuk jangka panjang salah satunya dilakukan melalui pendidikan yang berdimensi multikultural. Dalam hal ini penting merujuk James E. Banks⁴⁷ yang menguraikan lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu:

1. Integrasi pendidikan dalam Kurikulum (*Content Integration*)
2. Konstruksi Ilmu Pengetahuan (*Knowledge Construction*)
3. Pengurangan Prasangka (*Prejudice Reduction*)
4. Pedagogik Kesetaraan antar Manusia (*Equity Pedagogy*)
5. Pemberdayaan Budaya Sekolah (*Empowering School Culture*)

Catatan:

Penulis, Doddy S. Truna, adalah Dosen Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Makalah disajikan pada Seminar Nasional 2012 Program Pascasarjana Magister Ilmu Sosial (MIS) Universitas Katolik Parahyangan-Bandung tentang “Konflik Etnis dan Agama di Indonesia”, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung tanggal 1 Desember 2012.

⁴⁷ Lihat Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, bekerjasama dengan JP Books, 2007), cet. Pertama, hlm. 75-79. Maslikhah mengutip Tilaar, dan Tilaar mengutip Banks yang menguraikan ke lima dimensi ini secara luas. Lihat Banks dan Banks, *Handbook of Research on Multicultural Education*, hlm. 4-18.

BAB III

STUDI KASUS I

KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI BANDUNG

Bandung; Ibu Kota yang Multi-etnis dan Multiagama

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbangkertosusila (Gerbangkertosusilo). Di kota yang bersejarah ini, berdiri sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (*Technische Hoogeschool te Bandoeng* - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), Bandung juga menjadi ajang pertempuran di masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.

Pada tahun 1990 kota Bandung menjadi salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah *Time*. Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada jaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh. Bandung dahulunya disebut juga dengan *Parijs van Java* karena keindahannya. Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan *mall* dan *factory outlet* yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur

Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Dan pada tahun 2007, British Council menjadikan kota Bandung sebagai *pilot project* kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.

Gambar 2.1. Kota Bandung di Jawa Barat



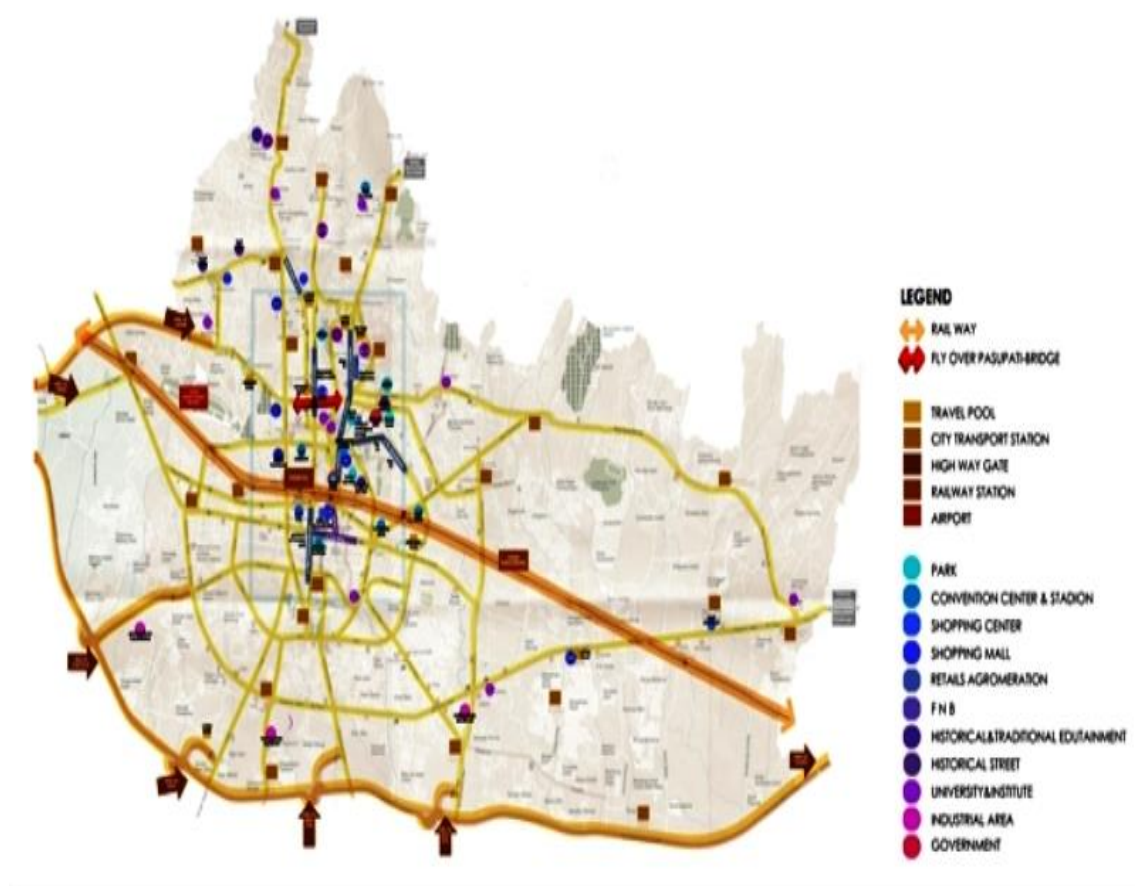
Sumber: http://www.world-guides.com/asia/indonesia/west-java/bandung/bandung_attractions_nearby.html, diakses tanggal 27 September 2013.

Tinjauan Geografis

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung dialiri dua sungai utama,

yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Gambar 2.2. Kota Bandung



Sumber: <http://arte-polis.info/past/arte-polis2/w5.htm>, diakses tanggal 27 September 2013.

Keadaan geologis dan tanah di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga

pada kawasan di bagian tengah dan barat, sedangkan kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Sementara iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata "Bandung" berasal dari kalimat "Nga-Bandung-an Banda Indung", yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-"Bandung"-an artinya menyaksikan atau bersaksi. "Banda" adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. "Indung" adalah Bumi, disebut juga sebagai "Ibu Pertiwi" tempat "Banda" berada. Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai "Banda". Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah "Banda Indung", yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada diluar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, "Nu Nga-Bandung-an". Yang disebut sebagai Wasa atau Sanghyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.

Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti

sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangkyang Tikoro.

Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jenderal waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung.

Kota Bandung secara resmi mendapat status *gemeente* (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini di bakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan *Bandung Lautan Api* dan diabadikan dalam lagu *Halo-Halo Bandung*. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.

Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama "Concordia" (Jl. Asia Afrika, sekarang), berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April-24 April 2005.

Kependudukan dan Pendidikan

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan etnis lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan *Long March Siliwangi*, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa. Kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan, dan Soekarno, presiden pertama Indonesia, pernah menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada masa pergantian abad ke-20.

Kekerasan Beragama di Kota Bandung

Tabel 1.

Data Kuantitatif Kasus Anti Keberagaman di Jawa Barat dan Bandung 2008-2012 *)

	SETARA	WI	CRCS
2008			
Jabar	73	32	12
Didukung/Dilakukan oleh Aparat Negara (**)	12	7	5
Bandung	-	3	1

2009			
Jabar	57	32	15
Didukung/Dilakukan oleh Aparat Negara	13	10	8
Bandung	2	10	3
2010			
Jabar	91	44	23
Didukung/Dilakukan oleh Aparat Negara	28	20	6
Bandung	5	2	2
2011			
Jabar	57	55	21
Didukung/Dilakukan oleh Aparat Negara	32	33	10
Bandung	2	15	-
2012 ***)			
Jabar	76	57 + 43	8
Didukung/Dilakukan oleh Aparat Negara	(tidak dirinci)	43	4
Bandung	(tidak dirinci)	5	1

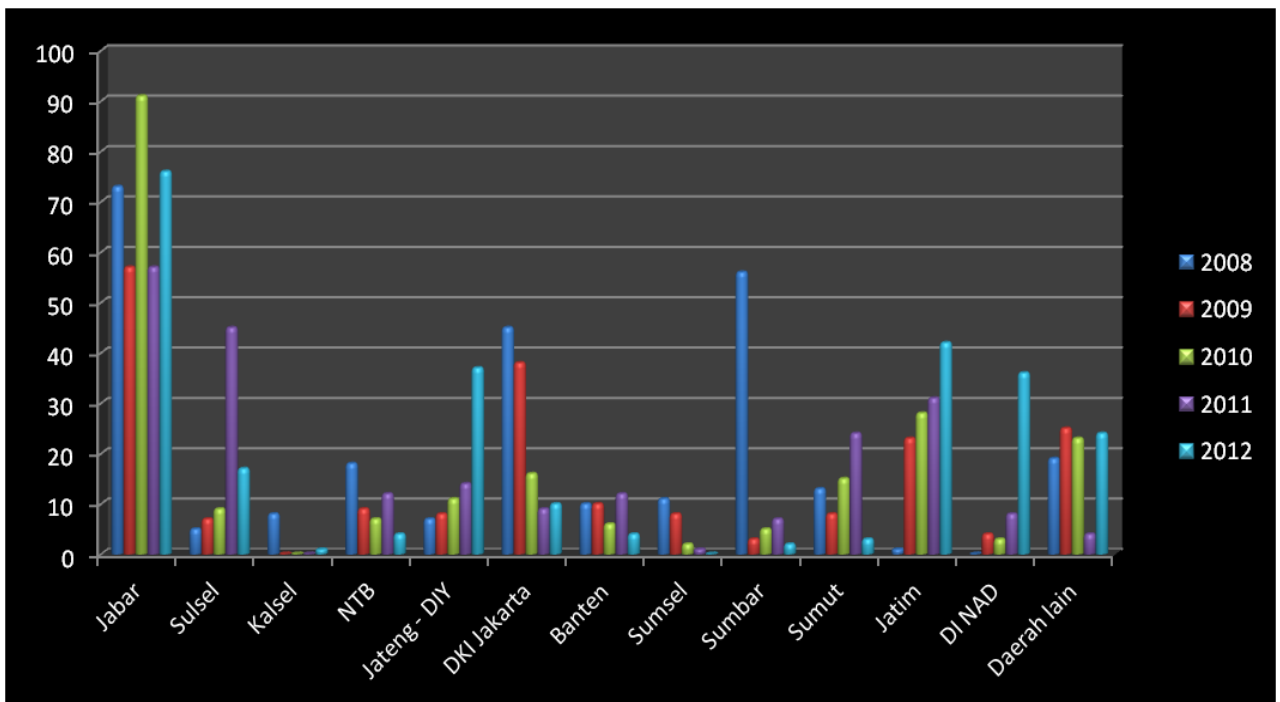
Catatan:

**) Ada 3 rujukan untuk data ini yaitu: SETARA Institute, Wahid Institute dan CRCS UGM. SETARA Institute menggunakan pendekatan yang mirip dengan Wahid Institute (memasukkan hate speech, intimidasi, tindak kekerasan, diskriminasi, aturan atau ucapan tidak netral dari pejabat negara sebagai bentuk pelanggaran), namun menghitung peristiwa dan tindakan sebagai hal yang berbeda (misal untuk kasus penutupan gereja-gereja di Rancaekek, Kab Bandung, peristiwanya hanya sekali namun ada setidaknya 5 tindakan). Sementara itu CRCS hanya menghitung peristiwa yang terlihat secara fisik (pengrusakan, penyerangan, penahanan dan penutupan rumah ibadah) serta dan produk aturan yang diskriminatis.*

****) SETARA dan Wahid Institute menghitung tindakan pembiaran (jadi tidak hanya tindakan aktif apara), namun dalam penyajian ini yang dihitung hanyalah tindakan aktif dari aparat yang mendukung terjadinya diskriminasi atau tindakan intoleran.*

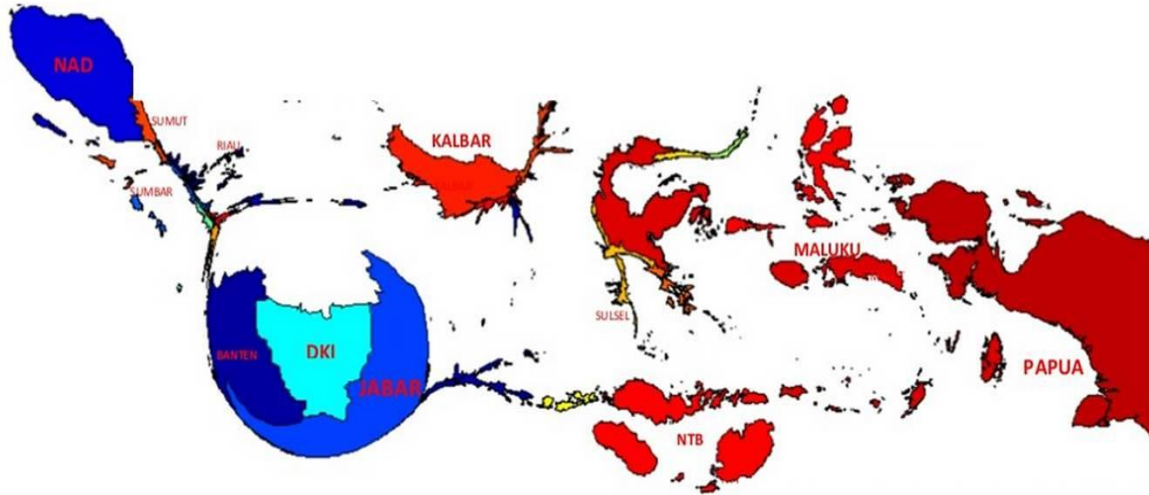
****) Dalam Laporan Tahun 2012 SETARA lebih menyajikan data secara kualitatif dan bersifat in depth pada beberapa kasus yang cukup disorot, sehingga rincian kuantitatif per kasus kurang disajikan. Sementara itu di laporan tahun 2012-nya Wahid Institute menyajikan data dengan memisahkan kasus yang dilakukan oleh aparat negara dengan aktor non-negara.*

Gambar 3. Perbandingan Kasus Intoleransi dan Diskriminasi di Jawa Barat dengan beberapa wilayah lain di Indonesia (2008-2012)



Sumber: Olahan Data dari Laporan Tahunan SETARA Institute 2008 -2012

Gambar 2. Ilustrasi lewat Reskala Peta Indonesia berdasarkan Potensi Konflik yang Ada



Sumber Fe-Institute (2013) sebagai ilustrasi dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (2012).

Catatan: Perbesaran menunjukkan besarnya potensi konflik, warna yang semakin merah menandakan semakin tingginya fraksionalisasi berdasarkan etno-linguistik. Terlihat bahwa di wilayah barat Indonesia, khususnya JABAR, fraksionalisasi konflik tidak condong ke masalah etno-linguistik (misal Sunda atau Non-Sunda), namun oleh masalah lain, yang JAKARTAUB yakni terutama sekali dikarenakan permasalahan intoleransi agama.

Kasus-Kasus Diskriminasi dan Intoleransi di Bandung:

Tahun 2008

15 Januari 2008. Masjid Mubarak, Jl. Pahlawan No 71, Bandung. Aliansi Umat Islam (ALUMI) Jawa Barat menyatakan Ajaran Ahmadiyah sesat dan mengancam akan menyegel kantor Ahmadiyah (dan sempat dilakukan). Mereka juga menuntut pembubaran Ahmadiyah. ALUMI juga melakukan demo dan membentangkan spanduk ukuran besar bertuliskan “Alumi Jabar Menolak Ahmadiyah” dan “Ganyang Ahmadiyah Ajaran Nabi Palsu.”⁴⁸

⁴⁸ Sumber Wahid Institute, 2008.

9 Nopember 2008. Blok Kupat. GBI (Gereja Bethel Indonesia) Blok Kupat, Bandung dilarang beribadah.

Tahun 2009

6 Februari 2009. Dalam sebuah pengajian di Bandung, Abu Bakar Ba'asyir: "tak ada cara lain untuk memperbaiki kondisi negeri ini selain menegakkan syariat Islam."

13 Februari 2009. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Drs Hafidz Utsman menyatakan haram bagi umat Islam mengikuti peringatan hari kasih sayang (Valentine's Day) yang diperingati setiap 14 Februari. Alasannya itu budaya non-Muslim.

49

25 Maret 2009. Aksi unjuk rasa sekitar seribu massa Gerakan Reformis Islam (GARIS), FPI Kota Bandung, AGAP, FUUI, Aliansi Gerakan Anti Maksiat (A-GAM) Majalengka, PAS Indonesia, Forum Penyelamat Aqidah Umat Kecamatan Kadungora, Garut dan Forum Pemberdayaan Mesjid Sumedang di Gedung Sate Bandung menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera melakukan pelarangan serta pembubaran Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.

2 April 2009. Sebanyak 48 calon legislatif (caleg) DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jabar melakukan kontrak politik dengan Forum Ulama Umat Islam (FUUI). Hal itu untuk mengurangi angka golput pada Pemilu 2009 serta janji caleg untuk memperjuangkan syariat Islam. Penandatanganan kontrak politik disaksikan Ketua FUUI,

⁴⁹ Wahid Institute 2009, SETARA Institute 2009, InCRes 2009.

K.H. Athian Ali Da'i dan diakukan di Masjid Al-Fajr. Caleg berasal daroi Golkar, PBB, PPP, PKS, PAN, Partai Patriot, Partai Hanura, PBR, dan PPIB.

7 Juni 2009. Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Ridwan di Kota Bandung: "Belajar dari Gubenur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. Masak Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah."

Tahun 2010

26 April 2010. GERAM melalui ketuanya Suryana Nur Fatwa menginstruksikan agar anggotanya melakukan sweeping terhadap buku *Tsunami Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit)*, mencari, dan membakarnya. Buku ini, menurut Suryana, dianggap menyatakan bahwa Abuya seolah menjadi pewaris Rasulullah SAW, padahal seharusnya pewaris nabi adalah ulama bukan Satria Piningit seperti yang digambarkan Abuya. GERAM juga mengimbau toko buku agar tidak menjual buku itu dan mengancam akan mendatangi pihak penerbit. Ketua Dewan Suro FPI dan AGAP Kota Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Suro Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung Hilman Firdaus juga menginstruksikan 10 ribu anggota dari 3 organisasi itu untuk mensweeping buku tersebut dengan alasan senada. Anggotanya diinstruksikan untuk mengecek, menginvestigasi, dan sweeping.⁵⁰

⁵⁰ Sumber Wahid Institute 2010, SETARA 2010.

7 Mei 2010. Sekitar 20 orang warga dari RW\ 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, mendatangi sebuah rukan yang sedang direnovasi di Jalan Soekarno Hatta No.405, Jumat (7/5/2010). Mereka membawa spanduk berbunyi 'Mayoritas Muslim Karasak RW 06 Menolak kegiatan Kegerejaan di Wilayah Kami'. Bangunan tersebut diduga dijadikan gereja tapi tak berizin dan warga menolaknya. Perwakilan warga, Yosep Solehudin mengatakan, selama aktivitas itu berlangsung pihak tempat ibadat tidak berusaha memproses izin bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadat. Menurut Yosep, warga setempat tetap ngotot agar tidak ada lagi kegiatan seperti itu.

14 Nopember 2010. Penghentian oleh masyarakat atas aktivitas peribadatan Majelis Gereja (Sintua) Gereja HKBP di Jl. Teratai No. 51 Bandung.

21 Nopember 2010. Penolakan massa Gerakan Reformis Islam (GARIS) atas Gereja Reheboth Berea di Jalan Karasak, Bandung, mereka menuntut penutupan gereja tersebut.

Tahun 2011

6 Januari 2011. Front Pembela Islam (FPI) Bandung meluruk hotel The Amaroossa tempat kegiatan FGD Setara Institute. Mereka beralasan bahwa lembaga ini sering membuat laporan-laporan yang mendiskreditkan Islam. Mereka mencoba menghentikan kegiatan tersebut. FGD yang tadinya direncanakan berlangsung 4 jam berubah menjadi satu setengah jam. Menjelang acara usai, sepuluh orang yang mengaku

berasal dari HMI Bandung merangsek ke tempat acara meminta diskusi segera dihentikan.⁵¹

1 Februari 2011. Ratusan santri dari Pesantren Sirnamiskin, *Nahdliyyin Centre*, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (Fosil PP) se-Kota Bandung, dan Muslimat NU Kota Bandung serta pimpinan Pondok Pesantren Sirnamiskin melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Ciputra BizPark menyusul akan dibangunnya GBI yang jaraknya kurang dari satu meter dari pesantren. Massa membubarkan diri secara sukarela setelah mendapat pernyataan dari perwakilan PT. Central International Property. Mereka mengeluarkan surat pernyataan tidak akan membangun tempat ibadah dalam proyek mereka.

25 Februari 2011. Sekitar 50 orang dari API Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Keputusan Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah. Koordinator API Jabar, Asep Syarifudin mengatakan bahwa keputusan ini tidak perlu lagi mengacu SKB 3 Menteri tapi SBY harus mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah. Ia memberi batas sampai 1 Maret 2011 untuk mengeluarkan Keppres. Ia juga menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran di luar Islam serta sesat menyesatkan. Di hari yang sama DDII Kota Bandung melalui ketuanya Muchsin al-Fikri, S.Sos dalam acara Tabligh Akbar "Membongkar Kedok Ahmadiyah" di mesjid Istiqomah Jl Citarum menuntut Presiden secepatnya mengeluarkan Kepres/Inpres pelarangan, pembubaran dan penyegelan semua mesjid dan kantor tempat Ahmadiyah beraktifitas sebagai bentuk implementasi SKB.

⁵¹ Sumber SETARA Institute, Wahid Institute, INCRES Bandung.

3 Maret 2011. Gubernur Jabar, akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan adanya pergub tersebut, menurut dia, maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang di provinsi Jabar. Adapun aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan pergub tersebut, katanya, ialah larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Kemudian, ia menyatakan, larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.

Dalam jumpa pers gubernur menyatakan dengan mengeluarkan beberapa pernyataan terkait Ahmadiyah yang mengacu pada Pergub ini:

1) seluruh atribut Ahmadiyah yang terpasang di masjid harus segera dicopot dan masjid yang dulunya disebut Masjid Ahmadiyah akan dinyatakan sebagai masjid bersama yang boleh digunakan oleh kaum muslim; 2) jemaat Ahmadiyah harus mau menerima pembinaan untuk menghentikan penyimpangan penafsiran yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Islam; 3) masyarakat yang mengetahui aktivitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam maka wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian.

7 Maret 2011. Dalam acara sosialisasi Pergub No. 12 Tahun 2011, Gubernur Jabar menyatakan mulai Jumat pekan ini khatib Jumat di masjid Ahmadiyah akan

ditentukan oleh Kapolda dan Gubernur. Keduanya juga akan menunaikan ibadah shalat jumat di masjid-masjid Ahmadiyah.

10 Maret 2011. Pendataan susunan Pengurus, kegiatan dan jemaat Mesjid Fadlullah Bandung Wetan (milik JAI) oleh Koramil.

12 Maret 2011. Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) melalui ketuanya, Athian Ali, mendesak pemerintah pusat segera membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak ingin rakyat berkelahi, pemerintah harus segera membubarkan Ahmadiyah. Kalau tidak berani, dibubarkan saja Islam. Kalau tidak juga berani mengeluarkan sikap, dibubarkan saja pemerintahnya. Menurut Athian, pemerintah seharusnya melihat apa yang telah dilanggar ajaran tersebut secara organisasi keagamaannya, bukan keyakinan pribadi sehingga pemerintah pusat bisa melakukan intervensi dengan cara membubarkan Ahmadiyah. Penodaan terhadap agama, menurut Athian, adalah pelanggaran terhadap HAM.

21 Maret 2011. Delapan anggota Ahmadiyah dari dua keluarga di Kota Bandung menyatakan kembali memeluk Islam disaksikan oleh para pejabat Pemkot Bandung dan tokoh agama. Meski mengaku tanpa ada paksaan, pernyataan itu dilakukan setelah mendapat masukan dari tokoh agama dan demi tidak dikucilkan serta keleluasaan beribadah.

24 Maret 2011. Seratus lebih massa Garis dari berbagai daerah di Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate menuntut Gubernur Jawa Barat mendukung pelarangan Ahmadiyah. Mereka juga mendesak Gubernur untuk membuat rekomendasi kepada Presiden agar dibuat Keputusan Presiden tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia, membentuk tim pembinaan Ahmadiyah berikut anggarannya, dan menjadwalkan

pertemuan dengan Heryawan sekalian bersama orang-orang mantan Ahmadiyah yang sudah bertobat untuk diminta bantuan membawa agar orang-orang Ahmadiyah lainnya segera bertobat.

8 April 2011. Polisi menolak memberikan izin acara dialog antar-agama bertajuk Interfaith Dialogue 2011 – Kebebasan Agama dalam Demokrasi: Antara Utopia dan Realita dengan KSMPMI sebagai panitianya (Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional) Universitas Katolik Parahyangan. Penyebabnya, takut diserang oleh ormas yang menolak pluralisme di Bandung sebagaimana acara Setara – Inces beberapa waktu lalu. Karena soal ini, tempat acara yang semula berada di Hotel The Ardjuna Bandung ke Gedung Fisip Unpar dan dimajukan sehari dari jadwal semula.

12 April 2011. FUUI Bandung menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan agar melengkapi Peraturan Gubernur No. 12 Th. 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah dengan memasukkan ajaran Syiah dan LDII sebagai ajaran menyimpang dari agama. Mereka juga meminta agar Syiah dan LDII dibekukan.

23 Juni 2011. Gubernur Jabar mengatakan, dalam ceramah acara peringatan Isra Mi'raj, di Bandung bahwa hingga sekarang lebih dari 1.000 pemeluk Ahmadiyah di Jabar setelah kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Di Jabar sendiri terdapat 17.000 pemeluk Ahmadiyah di Jawa Barat, apabila setiap bulan ditargetkan 1.000 pemeluk Ahmadiyah dikembalikan keyakinannya pada Islam, maka belasan bulan kemudian hanya akan ada ratusan pemeluk Ahmadiyah saja.

8 Juli 2011. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Jaya Subriyanto melarang keras pengusaha tempat hiburan di Kota Bandung membuka tempat usahanya saat bulan

Ramadan untuk menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Termasuk tempat usaha ini adalah tempat hiburan, yaitu massage, karaoke, diskotek, dan tempat ketangkasan seperti biliar.

6 Oktober 2011. Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, HM Rafani Achyar mengatakan bahwa MUI Jawa Barat menolak kunjungan Miss Universe Leila Lopez ke Kota Bandung karena dijadwalkan akan bertemu dengan Wali kota Bandung, Dada Rosada yang telah mencanangkan program Kota Bandung sebagai 'Kota Agamis'. Ia menilai pertemuan tersebut tidak relevan dengan program Bandung sebagai Kota Agamis yang merupakan kota tanpa minuman keras, pornografi, dan pornoaksi. Menurutnya, gelar Miss Universe didapat dengan proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, seperti mengenakan bikini di catwalk dengan mengumbar bentuk tubuh. Pada beberapa hari yang sama dilakukan demonstrasi menentang kedatangan Leila.

30 Nopember 2011. Rencana kedatangan Julia Perez atau Jupe ke Kota Bandung ditentang keras anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat Deni Rudiana. Alasannya Jupe yang sering berpakaian seksi dan vulgar dikhawatirkan bisa berdampak negatif terhadap generasi muda, apalagi saat ini Kota Bandung sedang gencar memproklamkan menjadi Kota Agamis.

1 Desember 2011. FUUI menilai Wali Kota Bandung Dada Rosada tidak mengerti Undang-Undang (UU) Pornografi menyusul keluarnya izin bagi artis Julia Perez untuk tampil di Bandung. Sekjen FUUI Hedi Muhammad merasa tidak mengerti Walikota tidak melarang artis ini. Karena itu, lanjutnya, atas nama FUUI dan Koordinator Aliansi Umat Islam (Alumi) Jabar yang merupakan gabungan 41 ormas dan organisasi kepemudaan

(OKP) mendesak wali kota mencabut izin tersebut. Jika tak dicabut, Hedi mengaku akan segera melakukan konsolidasi bersama seluruh anggota Alumni untuk menentukan langkah yang akan diambil. Hedi menegaskan, goyang Jupe jelasjelas bisa menodai citra Kota Bandung sebagai Kota Agamis. “Karena itu, saya jamin semua ormas dan OKP Islam menolak kehadiran Jupe di Bandung,” katanya. Izin ini akhirnya dicabut.

Tahun 2012

22 April 2012. Di Masjid al-Fajar, Cicagra, FUUI mengeluarkan fatwa sesat Ahmadiyah yang berisi tiga butir. Pertama, pribadi/ kelompok yang meyakini, mengajarkan dan menyebarkannya secara keseluruhan maupun sebagian dari faham Syiah di atas, yang meyakini dirinya pengikut syiah maupun tidak, adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam. Kedua, umat Islam wajib membatasi interaksi, baik pribadi maupun kelompok dengan pengikut faham Syiah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka. Ketiga, pemerintah Indonesia berkewajiban mengambil tindakan terhadap pribadi maupun kelompok Syiah, karena telah menodai kemurnian ajaran Islam sekaligus untuk menghindarkan konflik yang lebih besar sebagaimana terjadi di negara-negara lain.⁵²

25 Mei 2012. Dalam demonstrasi di depan Gedung Sate, FPI Wilayah Bandung menyatakan akan mengerahkan sekitar 250 massa jika saja konser Lady Gaga tetap dilangsungkan.

⁵² Sumber Wahid Institue 2012, SETARA Institute 2012; sindonews.com; okezone.com.

17 Juli 2012. Sebuah toko baju dan aksesoris di perempatan Rebel, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Regol, didatangi puluhan anggota FPI dan mereka melakukan perusakan. Alasan perusakan adalah karena toko tersebut dianggap menggunakan lambang Yahudi⁵³.

18 Juli 2012. FPI Bandung melakukan sweeping di Toko Edy Rusdy Jl. Gabus No. 9 RT 2/RW 5 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir yang menjual miras. Sebanyak 156 kardus dan 156 botol berbagai merek disita dan selanjutnya dihancurkan.

29 Juli 2012. FPI sweeping beberapa Hotel dan Penginapan di Bandung. Mereka menggeledah tempat-tempat ini dan menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berkencan. Mereka didata dan digiring ke kantor polisi.

Oktober 2012. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah bagi anak Usia SD dari kelas 2 sampai 5 Kota Bandung mulai dibahas. Pihak DPRD Kota Bandung berpendapat, pendidikan Islam sangat penting terutama bagi siswa sekolah yang hanya mendapat pelajaran di sekolah saja. Dengan adanya Perda tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah nantinya kemampuan dan pemahaman siswa menjadi lebih baik. DPRD juga beralasan bagi penduduk Kota Bandung yang mayoritas menganut agama Islam, Perda tersebut diperlukan untuk mendukung terciptanya kondisi masyarakat kota ini kepada kehidupan yang religius. Dalam rancangan yang ada, bagi siswa yang masuk SMP Negeri ataupun swasta harus melampirkan Ijazah kelulusan mengikuti pendidikan diniyah tadi.

⁵³<http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/18/21/659399/fpi-rusak-toko-berlambang-yahudi>, diakses 2 Oktober 2013].

25 Oktober 2012. Saat menjadi mediator antara FPI dan Ahmadiyah, pihak Polrestabes Bandung justru memaksa Ahmadiyah membuat surat pernyataan. Isinya, jemaat Ahmadiyah diminta untuk tidak melakukan sholat Ied dan kurban tetapi pihak Ahmadiyah menolaknya. FPI Bandung Raya kemudian merusak Masjid an-Nashir, Jl. Sapari Kelurahan Cibadak Kec. Astanaanyar yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Menurut mereka, aktivitas Ahmadiyah sudah dilarang sesuai SKB 3 menteri. FPI tetap ngotot setelah sebelumnya dinegosiasikan di Mapolrestabes Bandung.

27 Oktober 2012. Ormas keagamaan menuntut pembatalan festival tattoo Internasional yang seyogianya digelar di Mall Festival City Link, Jl Peta. Padahal acara ini sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian. Pihak Mall akhirnya membatalkan izin acara⁵⁴.

8 Nopember 2012. Di Gedung DPRD Kota Bandung FPI Priangan Timur meminta pemerintah agar tidak mengizinkan jemaat Ahmadiyah berhaji, menutup tempat ibadah mereka, dan tidak mencantumkan Islam dalam kolom agama mereka di KTP.

22 Nopember 2012. Kesbangpol Linmas meminta PMI yang bekerja sama dengan JAI Bandung untuk menghentikan kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin di Masjid An-Nashir Bandung mengingat insiden yang baru saja menimpa FPI pada malam Idul Adha lalu.

⁵⁴ <http://bandung.okezone.com/read/2012/10/27/526/710067/tekanan-ormas-acara-tatto-di-mal-festival-city-link-batal>, diakses 2 Oktober 2013].

Sepanjang tahun 2012 terjadi beberapa peristiwa yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal. Dari Januari hingga Oktober tahun 2012 tercatat sebanyak 315 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan 214 diantaranya terjadi tindakan kekerasan⁵⁵. Ada sebelas komunitas di Kota Bandung yang tergabung dalam aksi "Bandung Lautan Damai" yang menyatakan menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini dilakukan karena rasa keprihatinan terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan atas nama agama yang terus meningkat.

Koordinator Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama juga menambahkan Jawa Barat adalah provinsi tertinggi dalam kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan umat beragama. Di Jawa Barat sendiri terdiri dari 66 peristiwa kekerasan pelanggaran kebebasan beragama. Selain kekerasan dalam bentuk fisik juga terdapat diskriminasi dalam bentuk administrasi⁵⁶. Diantara peristiwa kekerasan terhadap agama dan pelanggaran kebebasan umat beragama yang terjadi di Bandung dari tahun 2008 hingga 2012, ada dua kasus yang terjadi di Kota Bandung yang dibahas di dalam tulisan ini. Kasus pertama adalah kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, dan kasus kedua adalah protes terhadap keberadaan BNKP gereja Nias.

Tinjauan Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, menyisakan problema krusial dalam pergulatan demokrasi Indonesia. Berbagai konflik kerap muncul, mulai konflik politik, ekonomi, sampai konflik agama. Dalam masalah politik, konflik antarelit dalam

⁵⁵ Disampaikan oleh Koordinator Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama (Jakatarub) Wawan Gunawan pada peringatan Hari Toleransi Internasional di Gedung Indonesia Menggugat 16 November 2012.

⁵⁶ Diungkapkan oleh Ketua Divisi Hukum Ekonomi Sosial Budaya Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Samuel Situmorang.

memperebutkan kekuasaan tidak kunjung usai. Dalam masalah agama, lahirnya berbagai pemikiran, paham, aliran dan gerakan memicu tumbuhnya radikalisme keagamaan dalam bentuk teror yang kerap muncul di berbagai wilayah di tanah air. Konflik tersebut tidak dipungkiri telah mengakibatkan terjadinya stagnansi ekonomi yang membawa rakyat Indonesia semakin terpuruk dan tidak berdaya.

Maraknya perkembangan pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan di era reformasi ini dapat dimaklumi karena pada era keterbukaan arus globalisasi merupakan suatu keniscayaan. Di era keterbukaan ini, selain arus pemikiran modern yang liberal, mengalir pula pemikiran yang lain, seperti paham fundamentalis, radikal, termasuk paham-paham keagamaan yang berbeda dengan paham *mainstream* (pemahaman keagamaan pada umumnya). Maraknya perkembangan pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan ini dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran dari luar seperti pemikiran yang dianggap liberal dalam memahami teks-teks agama.⁵⁷

Munculnya berbagai pemikiran, aliran, dan gerakan, bisa dipandang positif sebagai salah satu indikator dari terwujudnya kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Namun dari sudut pandang lain, kebebasan beragama (dalam bentuk pemikiran, paham, aliran dan gerakan) seringkali mengusik *mainstream* kelompok keagamaan pada umumnya, sehingga tidak jarang ekspresi keagamaan yang

⁵⁷Jurnal Harmoni, *Paham Keagamaan Antara Harmoni dan Konflik*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010. Hlm. 6.

baru itu sering dimaknai sebagai pelecehan agama.⁵⁸ Untuk mengantisipasi berkembangnya berbagai bentuk pelecehan agama, sejak tahun 1965 pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden tentang pelecehan dan penodaan agama.⁵⁹

Salah satu dari sekian banyak aliran keagamaan yang dianggap berbeda dengan *mainstream* umat Islam pada umumnya adalah Ahmadiyah. Aliran ini telah menjadi sorotan dunia khususnya Islam karena dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama, bukan hanya kepada Islam, tetapi juga kepada agama lainya seperti Kristen dan Hindu yang pada saat munculnya aliran ini merupakan agama yang banyak dianut oleh mayoritas penduduk di Hindustan (sekarang Negara India dan Pakistan).⁶⁰

Aliran ini meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu setelah Nabi Muhammad SAW. Pandangan dan keyakinan ini telah dianggap sesat⁶¹ oleh kalangan umat Islam pada umumnya karena dalam ajaran Islam

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁹Lihat Penetapan Presiden Nomor: I/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

⁶⁰Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Editor Ridwan Saidi dkk, (Jakarta: LPPI, 2010), Cet. Ke-1, hlm. viii.

⁶¹Penetapan aliran sesat terhadap paham Ahmadiyah telah dikeluarkan oleh fatwa MUI, Ormas-ormas Islam yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keputusan pemerintah. Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Nomor: 05/KEP/Munas/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa tersebut ditegaskan lagi dalam MUNAS VII tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: II/MUNAS VII/15/2005 tanggal 28 Juli 2005 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Di antara ormas-ormas Islam yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat adalah: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Yayasan Perguruan Islam sy-Syafi'iyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan beberapa ormas Islam lain. Dari fatwa MUI dan ormas-ormas Islam ini, pemerintah menindaklanjuti dengan berbagai keputusan di antaranya: Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota. dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat.

tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Perbedaan ini merupakan perbedaan yang sangat fundamental dan tidak sama dengan perbedaan dalam hal fiqih⁶² yang selama ini terdapat di antara penganut Islam dan sangat berpengaruh pada pemurnian tauhid yang menjadi dasar dalam ajaran Islam.⁶³

Oleh karena aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang fenomenal dan mendapat perhatian seluruh umat Islam di dunia, maka lahirlah fatwa dan pernyataan ulama dunia yang dinukil dalam fatwa-fatwa kontemporer Ulama Ahlusunnah dalam LPPI, di antaranya menyatakan: "sudah ada hukum dari pemerintah Pakistan berkaitan dengan kelompok ini, bahwa mereka telah keluar dari Islam". Juga dari Rabithah 'Alam Islami di Makkah Al-Mukarramah bahwa mereka keluar dari Islam dan dari Mu'tamar Al-Munadzdzamat Al-Islamiyah yang diadakan di Rabithah pada tahun 1394 H⁶⁴.

Sisi lain dalam melihat aliran Ahmadiyah ini adalah perspektif politik sebagaimana diuraikan oleh Ridwan Saidi dalam tulisannya: "Ahmadiyah dan Imperialisme" yang menyatakan bahwa, pada mulanya Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya mengaku sebagai Tuhan. Karena di kampung tempat kelahirannya ada beberapa orang yang mengaku Tuhan, dia pun ikut-ikutan mengaku Tuhan. Tapi karena *market* (pasar) "mengaku Tuhan" tidak terlalu bagus karena orang-orang langsung menganggapnya tidak waras, lalu Ghulam pun mengaku sebagai Isa bin Maryam, tetapi juga kurang begitu mendapat reaksi dan respon yang berarti. Akan tetapi ketika dia mengaku sebagai Nabi, maka mulailah ramai dibicarakan.

⁶²

⁶³Dede A. Nasrudin, *Koreksi Terhadap Pemahaman Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 14.

⁶⁴Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), *Op. Cit.*, hlm. 273.

Daerah atau kota tempat kelahirannya, yaitu Qadiyan, memiliki tingkat kunjungan wisata yang cukup ramai. Sehingga banyak orang yang ingin tahu sosok Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi baru itu seperti apa. Nah, di situlah Inggris tertarik. Jadi, tidak sejak semula Inggris menciptakan Mirza Ghulam Ahmad. Mengingat pada saat itu di Hindustan sudah terlalu banyak orang yang mengaku sebagai nabi, dan mengaku Tuhan. Jadi, Inggris melihat pemasaran Mirza Ghulam Ahmad itu bagus. Dari situlah gerakan-gerakan Ahmadiyah mulai mengarah kepada gerakan untuk membentengi kepentingan kaum imperialis Inggris.

Mirza Ghulam Ahmad selalu menyerang ulama-ulama yang pada umumnya waktu itu sedang menuntut kemerdekaan. Karena ulama-ulama di India khususnya wilayah Punjab sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Mirza berperan untuk merintanginya dengan berperilaku macam-macam, menantang ini, menantang itu, dan sebagainya; bersumpah serapah, mencaci maki dan seterusnya. Jadi, tidaklah salah kalau menyimpulkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah alat imperialis.

Karena Ahmadiyah menjadi alat atau infrastruktur yang bekerja untuk imperialisme, maka wilayah garapannya menimbulkan pertentangan. Dampaknya cukup serius karena Islam harus menghadapi dua pihak. Di satu pihak harus menghadapi *front* imperialis dan di lain pihak harus menghadapi *front* Ahmadiyah, seperti dalam kasus India. Dengan demikian berarti menambah kerja bagi umat Islam. Keberadaan Ahmadiyah dilindungi oleh pihak imperialis. Terbukti bahwa markas besar Ahmadiyah terletak di Qadiyan, India dan London, Inggris.⁶⁵

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 115-116.

Seiring dengan berkembangnya aliran dan paham Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kota Bandung, dalam rangka mengantisipasi terjadinya disharmonisasi kehidupan keagamaan di Kota Bandung, maka Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bandung setelah memperhatikan berbagai keputusan pemerintah dan fatwa MUI sebagaimana dijelaskan di atas, memutuskan hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh anggota Jamaat Ahmadiyah yang ada di Kota Bandung supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang Haq, yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandung khususnya Ummat Islam untuk tetap bijak dalam menghadapi mereka (Aliran Ahmadiyah) serta tetap berpedoman kepada Firman Allah.

Perkembangan Ahmadiyah di Kota Bandung

Sebagai kota yang sangat mudah untuk mendapatkan akses berbagai informasi dan aliran keagamaan, Kota Bandung sebagaimana kota atau daerah lain di Indonesia, telah dimasuki oleh aliran Ahmadiyah. Berdasarkan hasil penelaahan, aliran Ahmadiyah di Kota Bandung masuk sejak tahun 1948. Salah seorang pembawa pertama aliran Ahmadiyah bernama Ayo Abdul Qudus, yang dipercaya sebagai takmir⁶⁶ Masjid An-Nasr di Jl. Sapari Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

Upaya pengembangan faham aliran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Ayo tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ia hanya berhasil mengajak lingkungan

⁶⁶Takmir adalah orang yang dipercaya untuk menjaga kemakmuran masjid. Bertugas mulai dari aspek administrasi juga mengelola berbagai kegiatan di masjid itu.

keluarganya saja. Ketika sebagian anggota keluarganya itu ada yang berkeluarga, dan pindah tempat, anggota jama'ah Ahmadiyah di Masjid An-Nasr semakin berkurang. Namun demikian, kegiatan Ahmadiyah yang dilakukan di Masjid An-Nasr terkesan memiliki pengikut yang banyak karena jika melaksanakan suatu kegiatan seperti pengajian, banyak anggota jama'ah Ahmadiyah yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 400 orang.⁶⁷

Kegiatan aliran Ahmadiyah di Kecamatan Astanaanyar, di antaranya adalah Jumatan rutin setiap hari jum'at dan shalat lima waktu. Selain itu dibentuk lembaga jema'at yaitu: (1) Lajnah Imamiyah anggotanya jama'ah ibu-ibu, (2) Lajnah Syubaniyah yang anggotanya para pemuda, dan (3) Lajnah Ahmadiyah anggotanya jama'ah bapak-bapak. Salah satu bentuk penyebaran dan pengembangan aliran Ahmadiyah di Kecamatan Astanaanyar dilakukan dengan cara penyampaian doktrin-doktrin ajaran Ahmadiyah ke anggota jama'ah yang dilakukan dalam bentuk pengajian. Selain itu, disenyalir pula usaha rekrutmen anggota dilakukan dalam pendekatan ekonomi.⁶⁸

Sikap di lingkungan warga sekitar Masjid An-Nasr yang tidak sepaham dengan aliran Ahmadiyah melakukan upaya-upaya agar pengikut aliran Ahmadiyah tidak berkembang dengan merekrut anggota yang banyak. Salah satu upaya yang dilakukan di antaranya melalui pembinaan kepada anggota jama'ah Ahmadiyah dengan melibatkan berbagai unsur terutama ormas Islam dan Kementerian Agama.⁶⁹

⁶⁷Wawancara dengan salah seorang Penyuluh Agama Islam (Makmur) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tanggal 28 September 2013.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk program sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur dan SKB tiga menteri.

Di wilayah lain di Kota Bandung, perkembangan Ahmadiyah dapat di lihat di Masjid Al-Mubarak Jl. Pahlawan, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Seperti halnya di Masjid An-Nasr, jumlah jemaat Ahmadiyah Masjid Mubarak di Kecamatan Cibeunying ketika melaksanakan suatu kegiatan seperti pengajian bersama mencapai 600 orang yang juga berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Mubarak adalah menyelenggarakan Jumatan dan shalat lima waktu. Selain itu dibentuk pula lembaga jamaah yang terdiri atas: (1) Majelis Ta'lim, (2) Lajnah Imamiyah, (3) Lajnah Pemuda, dan (4) Lajnah Umum.⁷⁰

Perkembangan jama'ah aliran Ahmadiyah di Cibeunying terkesan lebih progresif hal ini dapat dilihat dari segi bangunan yang lebih permanen dan strategis dibandingkan dengan kegiatan Ahmadiyah di Kecamatan Astanaanyar. Selain itu, kegiatan yang dilakukan lebih semarak dan dapat mengkoordinir anggota Jama'ah Ahmadiyah dalam berbagai kegiatan yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sasaran penyeberan paham Ahmadiyah di masjid ini adalah kaum terpelajar bahkan terdapat anggota jama'ah Ahmadiyah yang merupakan seorang alumni perguruan tinggi terkemuka di Kota Bandung. Selain itu, cara penyeberan kepada masyarakat yang ekonominya di bawah standar dilakukan dengan pendekatan ekonomi.⁷¹

Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Bandung

Sebagaimana dijelaskan di atas, seiring dengan kebebasan setiap kelompok keagamaan mengekspresikan dirinya, maka dalam konteks aliran Ahmadiyah, antara

⁷⁰Wawancara dengan salah seorang Penyuluh Agama Islam Kecamatan Cibeunying Kaler (Nandang) tanggal 29 September 2013.

⁷¹*Ibid.*

pendukung atau pengikut Ahmadiyah dengan kelompok anti Ahmadiyah yang tidak sepaham, masing-masing menunjukkan kebebasan mengekspresikan diri. Pengikut dan pendukung aliran Ahmadiyah seakan mendapat ruang yang luas untuk bereksplorasi menyebarkan pahamnya. Kegiatan-kegiatan penyebaran aliran Ahmadiyah semakin semarak dilakukan terutama di dua titik sentral yaitu di Masjid An-Nasr dan Masjid Mubarak. Tak kurang keadaan ini memancing reaksi dari kelompok anti Ahmadiyah, tetapi reaksi yang dilakukan baru dalam bentuk penolakan dan penekanan kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan.

Salah satu puncak reaksi yang hampir mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik terhadap jama'ah Ahmadiyah terjadi di Masjid An-Nasr Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam) pada tanggal 26 Oktober 2012 (09 Dzulhijah 1433) Malam 'Idul Adha. Kronologi kejadiannya sesuai laporan salah seorang aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, bahwa pada malam Hari Raya 'Idul Adha Front Pembela Islam (FPI) mengadakan *sweeping* ke tempat-tempat minuman keras di Kota Bandung. Setelah selesai *sweeping*, sebagian kelompok FPI dalam perjalanan pulang melintasi Jl. H. Safari tempat Masjid An-Nasr. Di Masjid An-Nasr tersebut masih terdapat sebagian jama'ah Ahmadiyah yang belum pulang ke rumahnya.

Keputusan Pemerintah baik dalam bentuk SKB tiga menteri maupun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat, tampaknya menjadi tenaga bagi kelompok anti Ahmadiyah untuk melakukan bertindak, termasuk salah satunya dari kelompok Front Pembela Islam. Barisan FPI yang melintasi Masjid An-Nasr tersebut menyangka jamaah

Ahmadiyah sedang melakukan penyebaran paham Ahmadiyah ke kelompok masyarakat. Dalam situasi itu, untuk menambah kekuatan, kelompok FPI melakukan komunikasi dengan kelompok FPI lainnya yang sama-sama tengah melakukan *sweeping*. Kelompok FPI lainnya yang mendapat informasi tersebut langsung menuju Masjid An-Nasr. Terjadilah ketegangan sampai pada akhirnya dari pihak FPI melempar pintu dan merobohkan pagar karena memaksa masuk masjid. Namun, kejadian ini berhasil dileraikan oleh pihak keamanan Polsek Kecamatan Astanaanyar dan Poltabes Kota Bandung.

Salah seorang dari kelompok FPI yang diduga sebagai pemimpinnya ditahan dan diadili. Dalam keadaan ini, dari pihak FPI minta saksi ahli di pengadilan untuk meringankan tuntutan terhadap pimpinan mereka. Polrestabes Kota Bandung menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah. Dengan peristiwa tersebut, pemerintah Kota Bandung segera melakukan upaya-upaya pencegahan agar tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keagamaan tidak berkembang. Oleh karena berbagai pihak yang terkait, seperti Polrestabes Kota Bandung, Kejaksaan Kota Bandung, dan Kementerian Agama Kota Bandung, berusaha mengadakan upaya-upaya dalam bentuk pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok jama'ah Ahmadiyah, dan kepada kelompok anti Ahmadiyah yang melakukan kekerasan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Peristiwa kekerasan beragama di Kota Bandung dalam bentuk penyerangan di tengah malam terhadap jama'ah Ahmadiyah ini merupakan pertama kali di Kota Bandung. Segala bentuk peraturan di sisi lain terkadang dapat dijadikan legitimasi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan anarkisme.

Demikianlah sekilas potret riak kekerasan dalam beragama terhadap kelompok Ahmadiyah di Kota Bandung. Walaupun bentuk kekerasan terhadap jama'ah Ahmadiyah

khususnya di Kota Bandung tidak sampai memakan korban jiwa, namun secara moril telah menciderai Kota Bandung sebagai miniatur ketentraman dan keharmonisan hidup beragama di Indonesia. Berbagai keputusan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan hidup beragama, oleh karenanya perlu adanya upaya sosialisasi setiap keputusan dan peraturan ke berbagai pihak dan kelompok sehingga tidak terjadi salah penafsiran.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, tentang konflik dan kekerasan dalam beragama yang dilakukan terhadap jama'ah Ahmadiyah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas umat Islam pada umumnya melihat aliran Ahmadiyah sebagai ancaman karena perbedaan yang sangat fundamental mengenai perbedaan kenabian yang membuat perbedaan tauhid, bukan hanya sekedar perbedaan fiqih.
2. Pihak pemerintah terutama Kementerian Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri lebih meningkatkan koordinasi sehingga penanganan masalah Ahmadiyah dapat dilakukan secara proporsional.
3. Saran bagi kelompok keagamaan terutama yang menentang paham aliran Ahmadiyah hendaknya tidak bertindak anarkis, segala sesuatunya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
4. Hendaknya ditingkatkan dialog antar umat beragama dalam program yang terpadu dan terarah khususnya di kalangan arus bawah. Hal ini karena di kalangan arus bawahlah sering terjadinya gejolak keagamaan yang disebabkan karena adanya perbedaan paham

3.2. Protes Terhadap Keberadaan BNKAP Gereja Nias

Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang dilindungi undang-undang. Negara memberikan jaminan kepada setiap warga untuk memilih dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kota Bandung memiliki masyarakat heterogen. Di dalamnya tinggal berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam. Sampai sejauh ini, secara keseluruhan kehidupan beragama di kota Bandung tetap terjaga keharmonisan dan kerukunannya.

Dalam hal urusan agama, setiap pemeluk agama membutuhkan sarana berupa fasilitas peribadatan. Dalam proses pengadaan sarana peribadatan, secara normatif, diatur oleh undang-undang dan peraturan Pemerintah. Dalam hal pendirian rumah ibadat, diatur oleh Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2006 dan No.08 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Tujuan peraturan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dalam hal pendirian rumah ibadat sehingga kerukunan dan keharmonisan hidup beragama tetap terjaga.

Dalam implementasinya, terdapat banyak kesulitan karena realitasnya tidak semudah seperti yang tercantum dalam peraturan yang mengharuskan adanya syarat 90 orang dari pihak pengguna, dan ijin dari 60 orang dari masyarakat setempat serta adanya rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota. Dalam proses memperoleh rekomendasi, Kementerian Agama Kota Bandung dan FKUB Kota Bandung secara tidak tertulis mengharuskan adanya musyawarah di tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur MUSPIKA Kecamatan. Hal ini

dimaksudkan bahwa keberadaan tempat ibadat tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata di masyarakat sehingga kerukuan beragama tetap terjaga. Setelah proses itu ditempuh FKUB dan Kementerian Agama baru memberikan rekomendasi untuk diajukan ke Walikota Bandung.

Untuk melihat kebutuhan terkait tempat ibadat di Kota Bandung dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk dan tempat ibadat di Kota Bandung, sebagai berikut:⁷²

Tabel 1: Jumlah Penduduk Pemeluk Agama di Kota Bandung

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	2.576.540
2.	Kristen	189.850
3.	Katolik	72.187
4.	Hindu	3.287
5.	Budha	19.892
6.	Lain-lain/Khonghucu	230
	Jumlah	2.861.986

Tabel 2: Jumlah Rumah Ibadat di Kota Bandung

No.	Nama Rumah Ibadah	Jumlah Rumah Ibadah
1.	Masjid	2.356
2.	Gereja Kristen	124
3.	Gereja Katolik	25
4.	Pura	4
5.	Vihara	9
	Jumlah	2.518

⁷²Data ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandung hasil pendataan terbaru pada tahun 2012.

Sejak berlakunya Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2006 dan No.08 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kementerian Agama (Nunu Nugraha), Kementerian Agama Kota Bandung telah mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemanfaatan gedung/bangunan dijadikan sebagai tempat ibadat sebanyak 24 rekomendasi dengan komposisi 23 rekomendasi untuk gereja dan 1 untuk vihara Yashodara.⁷³

Protes Terhadap Keberadaan BNKP Gereja Nias

Protes terhadap keberadaan BNKP Gereja Nias yang beralamat di JL Holis RT/RW 07/10 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung untuk mendapatkan informasi yang utuh perlu dianalisis secara kronologis. Hal ini untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan proporsional dalam menilai peristiwa kekerasan dan konflik beragama tersebut.

Menurut penuturan mantan Kepala KUA Kecamatan Bandung Kulon (Drs. Didin),⁷⁴ di Kecamatan Bandung Kulon tepatnya di Jalan Holis RT/RW 07/10 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sejak tahun 2007 telah berlangsung kegiatan kebaktian di sebuah bangunan sejenis gudang oleh jemaat gereja BNKP.

Tahun 2008, BNKP mengajukan permohonan izin pendirian rumah ibadat ke pihak Kecamatan Bandung Kulon. Pihak Kecamatan merespon pengajuan itu dengan

⁷³Wawancara tanggal 27 September 2013.

⁷⁴Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2013

mengadakan pertemuan yang melibatkan jajaran MUSPIKA Bandung Kulon, warga sekitar, dan termasuk tokoh masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon. Hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa proses pengajuan ijin harus mengikuti prosedur yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Peraturan Bersama dua Menteri (PBM).

Selama dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2010, pihak gereja berusaha untuk memenuhi segala persyaratan yang telah diatur oleh PBM dua Menteri yang selanjutnya diajukan ke pihak Kecamatan Bandung Kulon. Pengajuan ijin ini dibahas oleh pihak Kecamatan dengan kembali melibatkan unsur MUSPIKA Kecamatan, tokoh masyarakat, dan unsur gereja. Dalam pembahasan itu, keputusannya adalah ditolak. Penolakan ini beralasan karena pengguna kebaktian walaupun telah mencapai 90 orang, berasal dari berbagai daerah di luar Kecamatan Bandung Kulon bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sedangkan dalam Peraturan Bersama dua Menteri dalam penafsiran mereka, pengguna rumah ibadah harus berasal dari wilayah kelurahan/desa setempat. Pernyataan sikap penolakan ini tercantum dalam surat pernyataan sikap warga No. 001/UI/RW-1/C/BK/VII/2010. Dengan dibubuhi tandatangan penolakan sejumlah 515 yang diketahui oleh seluruh RT dan RW 01 Kelurahan Caringin.⁷⁵

⁷⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung Dr. H. Ahmad Suherman tanggal 29 September 2013. Di antara hal yang krusial untuk mendapatkan ijin warga setempat karena perbedaan dalam pemahaman PBM dua Menteri yaitu pada pasal 14 ayat (2) poin (a) yang menyatakan: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi: "Pendirian rumah ibadah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat ini sering dijadikan alasan penolakan jika identitas pengguna rumah ibadah berasal dari berbagai daerah yang cukup jauh dari lokasi tempat ibadah. Sementara pasal (13) ayat 3 yang berbunyi: dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Ayat ini menjadi dasar bagi pemohon ijin

Tahun 2012, pihak gereja yang difasilitasi oleh Bapak Camat Kecamatan Bandung Kulon mengadakan pertemuan kembali yang melibatkan warga RW 01, yang pada tahun 2010 telah menyatakan sikap penolakan. Suasana dalam rapat pembahasan sudah mulai kurang kondusif. Berbagai interupsi dalam rapat yang bernada penolakan semakin kuat. Suasana rapat kurang kondusif ini mendapat usulan dari Kepala KUA Kecamatan Bandung Kulon untuk dihentikan.

Tahun 2012 akhir karena pihak BNKP Gereja Nias sangat mengharapkan ijin tempat ibadat, dan dengan pertimbangan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, Bapak Camat Kecamatan Bandung Kulon (Bp Bambang) atas nama pimpinan wilayah mengeluarkan surat ijin sementara dengan tidak melibatkan unsur MUSPIKA. Akibat pengeluaran surat ijin yang tidak dimusyawarahkan ini, reaksi warga semakin kuat melakukan penolakan yang menuntut surat ijin sementara itu dicabut. Dengan dibubuhi surat penolakan yang kedua dari warga setempat. Reaksi penolakan warga ini ternyata sudah melibatkan pihak luar yaitu unsur Front Pembela Islam (FPI). Mereka mendatangi kantor kecamatan secara masif yang menuntut pencabutan ijin yang dikeluarkan oleh Camat.

Keterlibatan FPI dalam kasus ini, sebagaimana dikonfirmasi kepada salah seorang staf KUA (Cecep Firdaus Muttaqin),⁷⁶ mengatakan bahwa keberadaan gereja Nias tersebut sudah menjadi sorotan dan pemantauan kelompok FPI yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon. Ketika Bapak Camat memberikan ijin tanpa koordinasi dengan Kementerian Agama dan Ketua FKUB Kota Bandung untuk memberikan

pendirian tempat ibadat, walaupun pengguna berasal dari berbagai wilayah. Dalam penafsiran bunyi pasal-pasal sebagaimana disebutkan, menurutnya seringkali terjadi perbedaan pemahaman.

⁷⁶Konfirmasi dilakukan melalui wawancara di Bandung, pada tanggal 27 September 2013.

rekomendasi atau pertimbangan tertulis, pihak FPI dan kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan gereja tersebut melakukan aksi.⁷⁷

Bulan Januari 2013, sesuai dengan kesepakatan bersama dan tuntutan warga, Bapak Camat (Bp Bambang) mengeluarkan surat pencabutan ijin sementara BNKP. Setelah menerima surat pencabutan ijin, warga RW 01 menuntut tindakan lebih lanjut terhadap yaitu penghentian kegiatan peribadatan di wilayah tersebut. Tuntutan ini direspon oleh Camat dengan cara meminta waktu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Pada tanggal 27 Januari 2013, warga yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Islam Reformasi (GARIS), memastikan apakah tempat yang dipergunakan untuk beribadat itu masih digunakan atau tidak, dan mereka melakukan orasi di lingkungan tempat ibadat. 1 Maret 2013, Aktifis warga yang dimotori oleh FPI/GARIS melakukan tuntutan kembali kepada Bapak Camat untuk menghentikan aktivitas tempat ibadat. Untuk penyelesaian masalah ini dan dalam rangka meredam tuntutan para demonstran, Kasi Penindakan SATPOL PP (sumber tidak menyebutkan nama), memberikan solusi akan menjamin dan menyelesaikan tuntutan masyarakat sesuai tuntutan hukum.

Pada hari Selasa 5 Maret 2013, di ruang Satpol PP belangsung penandatangan surat pernyataan bahwa bangunan sejenis gudang yang terletak di Jalan Holis RT/RW 07/10 tidak akan lagi dijadikan sebagai tempat peribadatan, sebelum ijin keluar sesuai

⁷⁷Salah satu persyaratan administrative yang harus ditempuh dalam Peraturan Bersama Dua Menteri dalam hal Pendirian Rumah Ibadat atau Ijin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, diperlukan rekomendasi (izin pendirian rumah ibadat) atau pertimbangan tertulis (izin sementara pemanfaatan bangunan gedung) dari Kementerian Agama dan Ketua FKUB Kabupaten/Kota. Untuk konteks Kecamatan Bandung Kulon, Bapak Camat tidak menempuh proses itu, sehingga masyarakat mempertanyakan izinnya dari kedua lembaga yang berwenang tersebut.

peraturan yang berlaku. Kamis, 7 Maret 2013 disaksikan oleh unsur RW 10 diadakan penurunan atribut gereja didampingi oleh ketua RW dan beberapa tokoh masyarakat.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kondusifitas kehidupan beragama di Kota Bandung tetap terjaga. Hal ini dicirikan dalam proses permohonan izin tempat ibadat berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan informasi dari FKUB Kota Bandung, Kota Bandung merupakan kota kedua yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi perizinan pendirian rumah ibadat di Indonesia setelah diberlakukannya PBM dua Menteri.
2. Kalaupun ada riak-riak protes seperti yang terjadi di Kecamatan Bandung Kulon, itu hanya terjadi karena proses permohonan yang difasilitasi oleh aparat pemerintah dalam ini kecamatan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan bentuk protes dari warga dapat segera diatasi oleh pihak-pihak terkait.
3. Dalam upaya menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama khususnya di Kota Bandung, perlu dilakukan antisipasi dengan mempertajam studi lapangan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, sehingga gejala yang mengarah kepada potensi disharmonisasi dalam bentuk kekerasan dan konflik keagamaan dapat dideteksi sedini mungkin untuk diberikan alternatif dan solusi penyelesaiannya.
4. Kekerasan terhadap agama yang terjadi di Kota Bandung hingga saat ini tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menyebabkan rasa takut kepada aliran agama lain yang ditentang.

BAB IV

TERORISME DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI TASIKMALAYA

Pendahuluan

Tasikmalaya merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Barat, memiliki kemajemukan sosial, budaya & agama. Pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, terdapat pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung. Mereka memiliki kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh), yang berarti kekuasaan raja baru dianggap sah setelah mendapatkan persetujuan Batara yang bertahta di gunung Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.⁷⁸

Secara Geografis, posisi Tasikmalaya berada di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota provinsi Bandung ±105 km. Saat ini, Tasikmalaya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Pemerintahan Kota dan wilayah Kabupaten. Melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, tertanggal 17 Oktober 2001 diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta, Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi terbentuk dan diberikan kewenangan membentuk wilayah

⁷⁸ anugerahnoerhadi.wordpress.com/2011/12/30/sejarah-kab-tasikmalaya/, diakses tanggal 28 September 2013.

administrasi dan pengelolaan pemerintahan yang otonom terlepas dari administrasi pemerintahan induknya, Kabupaten Tasikmalaya.⁷⁹

Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri atas 10 kecamatan, yaitu kecamatan Kawalu, Tamansari, Cibeureum, Tawang, Cihideung, Mangkubumi, Indihiang, Cipedes dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu. Kota Tasikmalaya berada pada posisi 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32" LS, Luas wilayah keseluruhan 171,56 km², dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.⁸⁰

Sedangkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah 2.708,81 km² atau 270.881ha. Secara administratif memiliki 351 desa yang tersebar di 39 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega, Bojonggambir,

⁷⁹ www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/32/name/jawa-barat/detail/3278/kota-tasikmalaya, diakses tanggal 28 September 2013.

⁸⁰ www.tasikmalayakota.go.id, diakses tanggal 28 September 2013.

Sodonghilir, Taraju, Salawu, Puspahiang, Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Cineam, Karangjaya, Manonjaya, Gunungtanjung, Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, Sariwangi, Sukaratu, Cisayong, Sukahening, Rajapolah, Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pagerageung, dan Sukaresik. Tiga kecamatan diantaranya berada di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan samudra Indonesia yaitu Kecamatan Cicalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Kabupaten Tasikmalaya terletak di antara 7°02' dan 7°50' Lintang Selatan serta 109°97' dan 108°25' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Garut⁸¹

Gambar 4.1. Peta Wilayah Tasikmalaya



Sumber: www.google.com

⁸¹ www.bappedatasikmalayakab.go.id, diakses tanggal 28 September 2013.

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya tahun 2011 sebesar 646.216 jiwa, dengan sebaran jumlah penduduk laki-laki 326.965 jiwa dan perempuan 319.251 jiwa.⁸² Sedangkan berdasarkan hasil sensus kependudukan tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.675.554 jiwa, dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km². Pada tahun 2010, penduduk laki-laki sebanyak 835.052 jiwa dan perempuan sebanyak 840.492 jiwa. Struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Menurut data dari Dinas Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga terbesar pekerjaan yaitu : petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau 10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani.⁸³

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kota Tasikmalaya 36,81% bergerak disektor industri. 24,26% dibidang perdagangan, hotel dan restoran, 15% bidang jasa, 8,7% disektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.⁸⁴ Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor penyedia lapangan kerja terbesar di tingkat wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sekitar 43,22%, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan

⁸² tasikmalayakota.bps.go.id/subyek/penduduk-kota-tasikmalaya, diakses tanggal 28 September 2013.

⁸³ www.bappedatasikmalayakab.go.id, diakses tanggal 28 September 2013.

⁸⁴ tasikmalayakota.bps.go.id/subyek/penduduk-dan-tenaga-kerja-kota-tasikmalaya

masyarakat, namun realitanya buruh tani justru berada pada kondisi rentan terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan, layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun komoditas pertanian menjadi sektor unggulan Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi pada komoditi ekspor. Komoditi-komoditi utama sumber ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meliputi padi organik yang dihasilkan 7 (tujuh) Kecamatan (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra produksi di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan sentra pada sektor industri kerajinan tangan di Rajapolah dan bordir di Sukaraja.⁸⁵

Sarana pendukung pendidikan pada saat ini sudah cukup tersedia di wilayah Tasikmalaya, mulai sarana untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan sampai ke tingkat perguruan tinggi/sekolah tinggi. Selain itu, terdapat pula pondok-pondok pesantren hampir di setiap kecamatan baik ditingkat wilayah pemerintah kota maupun ditingkat wilayah kabupaten, yang mencirikan pola hidup masyarakat yang agamis. Secara kuantitatif fasilitas pendidikan yang ada sudah mencukupi kebutuhan penduduk, namun keberadaannya belum merata antara tingkat wilayah Kota dan Kabupaten.

Sarana pendidikan di wilayah Kota Tasikmalaya yang tersedia kepemilikannya beragam, ada sekolah negeri (dibangun oleh pemerintah) maupun swasta. Beberapa bangunan fisik sekolah sebagian kondisi ruangannya telah mengalami rusak berat dan ruang rusak ringan mencapai sekitar 17% dan kondisi baik sekitar 66%. Adapun berikut adalah jumlah sarana pendidikan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan data 2006-2010, sebagai berikut:

⁸⁵ *Ibid.*

Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Jenis	Kecamatan									
	Kawalu	Taman Sari	Cibeureum	Tawang	Cihideung	Mangku bumi	Indihian g	Cipedes	Bungur sari	Purba ratu
TK	6	2	7	13	12	7	5	11	1	1
RA	7	9	20	10	6	11	17	8	11	11
SD	34	21	37	39	30	34	37	35	17	
MI	8	6	15	1	3	5	7	3	6	4
SMP	4	3	4	11	5	4	7	5	3	3
MTs	5	5	9	1	2	5	7	2	-	-
SMA	1	1	2	8	4	1	5	3	-	-
MA	4	1	4	2	2	1	4	1	-	-
SMK	-	2	1	6	4	1	2	7	-	-
PT/ST	-	2	1	-	1	1	1	4	-	-
Pontren	47	45	36	30	27	8	15	6	-	-
SLB	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-

Data: RJPMD Pemerintah Kota Tasikmalaya 2006-2010

Data jumlah sarana dan prasarana pendidikan di tingkat wilayah kabupaten belum tersedia data bagannya, namun pelayanan pendidikan di wilayah kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru berdasarkan data tahun 2009, tersedia 1.089 sekolah dasar untuk 187.201 siswa yang berarti 1 sekolah melayani 171 siswa. Sedangkan untuk ketersediaan guru sekolah dasar yaitu 9.355 guru, yang berarti 1 guru melayani 20 murid. Untuk pendidikan menengah, tersedia 178 sekolah menengah pertama untuk 55.011 siswa yang berarti 1 sekolah melayani 309 siswa. Sedangkan untuk ketersediaan guru sekolah menengah yaitu 3.917 guru, yang berarti 1 guru melayani 14 murid. Pembangunan pendidikan di wilayah kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya memberi pelayanan yang merata, berkualitas dan terjangkau karena sebagian masyarakat kabupaten berpendapat bahwa biaya pendidikan masih relatif mahal dan pendidikan

belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.⁸⁶

Kondisi wilayah Tasikmalaya secara keseluruhan jika dilihat dari berbagai sektor idealnya telah memenuhi kriteria wilayah pembangunan nasional, meskipun beberapa hal seperti kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks yang menjadi pekerjaan utama pemerintah kota dan kabupaten Tasikmalaya. Kemiskinan yang dimaksud bukan saja berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ekonomi, tetapi juga meliputi kemiskinan sosial, budaya, psikologi, religi, bahkan politik yang erat kaitannya dengan keterbelakangan dan kebodohan sumberdaya manusia. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan utama yang terjadi beberapa tahun terakhir yaitu munculnya kasus-kasus kekerasan di beberapa titik baik di wilayah pemerintahan kota maupun kabupaten. Isu agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pembangunan di Tasikmalaya.

Fenomena maraknya pertikaian antar golongan di kalangan umat beragama nampaknya semakin hari terus berlanjut tiada hentinya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemasan dan ancaman bagi keutuhan umat pada umumnya. Perbedaan pendapat dan pemahaman atas suatu masalah keagamaan telah mengakibatkan umat terpecah-belah menjadi beberapa golongan, madzhab, firqah, thariqat, aliran dan sebutan lainnya. Sepanjang perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik atau pertikaian tajam yang mengarah kepada ancaman terkoyaknya persatuan, kesatuan dan ukhuwah di kalangan umat Islam sendiri, kiranya tidak akan jadi permasalahan yang harus ditanggapi terlalu berlebihan. Namun bila hal tersebut telah dianggap membahayakan dan

⁸⁶ www.bappedatasikmalayakab.go.id

mengancam keutuhan persatuan umat muslim bahkan menjadi ancaman atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka seluruh umat Islam diharapkan hendaknya dapat melakukan introspeksi diri masing-masing dan mampu mengendalikan diri.

Latar Belakang Konflik dan Data Kekerasan bergama di Tasikmalaya

Sumber-sumber munculnya konflik yang terjadi di Tasikmalaya meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Perbedaan Doktrin

Pihak yang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari jika perbedaan doktrin yang menjadi penyebab dari benturan. Setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan aliran ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas aliran agama sendiri dan aliran agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada aliran agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan patokan untuk menilai sesat aliran ajaran agama lawan dan menumbuhkan sikap agresif, kurang toleran dan terkadang fanatik.

2) Sikap dan Arogansi Kelompok Radikal

Fenomena konflik sosial akibat adanya kelompok radikal yang menggerakkan terjadinya kekacauan melalui upaya provokasi massa. Agenda propaganda untuk menyudutkan ideologi kepercayaan atau mazhab agama kelompok lain merupakan

dasar dari gerakan kelompok radikal yang tumbuh kembangnya cukup pesat di Indonesia umumnya dan Tasikmalaya khususnya. Signifikansi yang terjadi dapat dilihat dalam kasus Ahmadiyah di desa Tenjowaringin yang secara geografis berada tepat di perbatasan antara Tasikmalaya dan Garut. Sejak tahun 1960-an desa ini telah dikenal sebagai basis Ahmadiyah terbesar di Tasikmalaya. Warga Ahmadiyah mencapai 80 persen dari 4.500 warga. Wilayah Desa Tenjowaringin meliputi lima dusun: Wanasigra, Citeguh, Sukasari, Cigunung Tilu dan Ciomas. Dusun ini merupakan pusat utama dan pertama penyebaran Ahmadiyah dengan tokohnya Ajengan Ejen, imam masjid al-Fadhal Wanasigra. Di Dusun ini pula cabang pertama Ahmadiyah di Tenjowaringin berdiri. Bahkan Khalifah Ahmadiyah IV Mirza Thahir Ahmad tahun 2000 pernah berkunjung untuk meresmikan SMU Plus al-Wahid milik Ahmadiyah. Sedangkan di Dusun Citeguh, jumlah jemaat Ahmadiyah sekitar 75% dan di Dusun Sukasari dan Cigunung Tilu yang warga Ahmadinya lebih dari setengah jumlah penduduk. Hanya di kampung Ciomas Ahmadiyah menjadi minoritas yaitu sekitar 5%. Realitanya komunikasi di antara warga Ahmadi dan non-Ahmadi di Tenjowaringin sebenarnya tidak ada masalah bahkan bisa dikatakan tidak ada konflik. Meskipun berbeda aliran/ mazhab menyangkut keyakinan, tetapi didalam menjalankan kehidupan sosial merka cukup harmonis satu sama lain. Bahkan ketika pada Bulan April 2013, penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung secara damai. Dari empat kandidat, tiga orang berasal dari warga Ahmadi dan satu orang non-Ahmadi, namun jumlah suara terbesar justru diperoleh

calon dari jemaat Ahmadi.⁸⁷ Teror dan penyerangan yang terjadi dilapangan justru dilakukan oleh kelompok garis keras yang berasal dari luar wilayah desa.⁸⁸

Selama lima tahun terakhir beberapa kasus kekerasan, baik dalam bentuk teror ataupun penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah ibadah dan bangunan rumah tempat tinggal milik anggota kelompok aliran agama tertentu terus berlangsung. Pada 18 April 2008, sekitar seribu orang massa Forum Umat Islam (FUI) Tasikmalaya turun ke jalan menuntut pembubaran Ahmadiyah. Teriakan-teriakan “bubarkan Ahmadiyah”, “Ahmadiyah sesat”, “Ahmadiyah dibidani Inggris” dan sebagainya yang sesekali diselingi pekikan takbir. Aksi massa yang dimulai selepas shalat Jum’at diisi dengan orasi dan pawai mengelilingi jalan protokol Kota Tasikmalaya dan orasi di dua tempat, yakni di Tugu Adipura Jl. HZ Mustofa dan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.⁸⁹ Pada tanggal yang sama, Terjadi aksi perusakan dan terror terhadap masjid milik warga Ahmadiyah di Tasikmalaya. Kaca dan genting mesjid serta beberapa rumah warga Ahmadiyah rusak akibat dilempar sejumlah orang tak dikenal dalam tiga kali terror dengan waktu yang saling berdekatan setelah penetapan MUI dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kejaksaan

⁸⁷ <http://sosbud.kompasiana.com/2013/05/13/di-balik-bentrokan-ahmadiyah-di-tenjowaringin-tasikmalaya-555665.html>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁸⁸ <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/07/6/151748/Terror-masih-Terus-Hantui-Jemaah-Ahmadiyah-Tasik>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁸⁹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/04/28/aksi-damai-tolak-ahmadiyah-tasikmalaya/>, diakses tanggal 28 September 2013.

Agung yang menyatakan Ahmadiyah ajaran terlarang. MUI bahkan menyebut Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan harus dilarang oleh pemerintah.⁹⁰

Pada tanggal 16 April 2010, puluhan orang melakukan aksi coret-coret terhadap Masjid Mahmud atau masjid jamaat Ahmadiyah yang berada di Jalan Raya Cipakat, Kampung Kudang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi mencoret-coret pintu gerbang dan tembok masjid dilakukan dengan menggunakan cat semprot berwarna merah dengan berbagai macam tulisan.⁹¹

9 Desember 2010, upaya penyegelan aset milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Cicariang nomor 288, Desa Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya yang diduga merupakan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Tim Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Tasikmalaya.⁹² Pada Desember 2010 juga, sejumlah massa melakukan penyegelan dengan menggembok panti asuhan milik Ahmadiyah. Dalam aksi tersebut, 10 anak terkunci di dalam panti asuhan, padahal anak-anak harusnya mengikuti ujian di sekolah.⁹³

Tanggal 12 April 2012, massa FPI melakukan penutupan dan penyegelan paksa terhadap salah satu mesjid di Singaparna. Penyegelan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Cipakat, Camat Singaparna, Polsek Singaparna dan Staf Koramil yang sebelumnya melakukan upaya dialog dengan jemaah Ahmadiyah Singaparna yang melibatkan

⁹⁰ <http://www.setara-institute.org/en/content/kekerasan-yang-berulang>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² <http://www.tempo.co/read/news/2010/12/09/178297869/Pemerintah-Tasikmalaya-Diduga-Tahu-Rencana-Penyegelan-Aset-Ahmadiyah>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁹³ <http://islamlib.com/?site=1&aid=1711&cat=content&title=suara-mahasiswa>, diakses tanggal 28 September 2013.

Muspida setempat, namun ancaman dan pemaksaan dari massa FPI akhirnya membuat jemaah Ahmadiyah Singaparna merelakan Masjid tersebut di segel dengan penyegelan dan pemalangan papan di setiap pintu dan jendela Masjid oleh massa FPI.⁹⁴

20 April 2012, massa FPI dan gabungan ormas Islam lainnya merusak masjid jamaah Ahmadiyah Baitul Rahim, Jumat sekitar pukul 10.00 WIB. Pengrusakan menimbulkan kerusakan fasilitas masjid, dan ada upaya pembakaran masjid secara keseluruhan, namun dapat dipadamkan. Dari beberapa kali peristiwa terror, ancaman dan penyegelan terhadap Masjid Baitul Rahim Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh FPI, tidak ada satupun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangkap pelakunya. Menurut warga jemaah Ahmadiyah Singaparna, pelaku kekerasan berasal dari kelompok dan orang-orang yang sama. Tidak adanya upaya perlindungan keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara maksimal untuk melindungi jemaah Ahmadiyah dan sarana peribadatannya menimbulkan keresahan dan memberikan keleluasaan pelaku kekerasan (FPI) dalam melakukan aksinya.⁹⁵

Salah satu contoh kasus terakhir yang terjadi adalah penyerangan dan pengrusakan Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah di Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya oleh sekelompok massa. Latar belakang penyerangan dipicu oleh adanya dugaan pondok pesantren tersebut menyebarkan aliran sesat. Kejadian tersebut disusul dengan penyerangan Mesjid Baiturahim milik Jemaat Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal

⁹⁴ <http://www.setara-institute.org>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁹⁵ <http://www.setara-institute.org/en/content/kekerasan-yang-berulang/>, diakses tanggal 28 September 2013.

5 Mei 2013.⁹⁶ Kedua aksi penyerangan dan pengrusakan di Desa Tenjowaringin dan Desa Cipakat, selain dilatarbelakangi dugaan menganut dan menyebarkan ajaran sesat juga dipicu oleh adanya kegiatan pertemuan warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ditenggarai sebagai kegiatan “jalsah” atau muktamar JAI dengan agenda mencetak laskar JAI. Namun hal tersebut dibantah keras oleh pihak JAI, karena pertemuan hanya sebatas kegiatan silaturahmi antar warga penganut JAI sekecamatan Slawu, sebagaimana dikutip oleh Kapolres Tasikmalaya, AKBP Wijonarko, SH,SIK.⁹⁷

Upaya Penyelesaian Konflik

Menteri Agama RI Drs. H. Suryadharma Ali M.Si mengatakan, jika Kemenag akan membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian konflik ahmadiyah. Menteri Agama juga akan mempertimbangkan beberapa usulan para ulama dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang meminta Ahmadiyah dibubarkan atau dijadikan agama baru. Kementerian Agama akan membahas usulan tersebut dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung dan beberapa institusi lainnya yang terkait. Termasuk usulan mengenai SKB Tiga Menteri tentang ahmadiyah yang harus ada sanksi yang jelas bagi pengikut ahmadiyah yang melanggar SKB Tiga Menteri. Jika opsinya ahmadiyah menjadi agama baru maka ahmadiyah harus menanggalkan seluruh simbol-simbol Islam.⁹⁸

⁹⁶<http://bem-fpp.umm.ac.id/id/nasional-umm-2501-kemenag-kutuk-kekerasan-atas-nama-agama.html>, diakses tanggal 28 September 2013.

⁹⁷ Teten Suirman, *Kekerasan Atas Nama Beragama*, di www.kabarpriangan.com diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

⁹⁸ <http://www.jpnn.com/m/news.php?id=172953>, diakses tanggal 28 September 2013.

Berdasarkan informasi majalah mingguan *Tempo*, sejauh ini upaya penyelesaian konflik agama yang terjadi di Tasikmalaya dilakukan Bakorpekem, Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya, Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri, kepala kantor agama, dan kepala Kesbang hanya mengacu pada SKB tiga menteri. Berkaitan dengan keresahan warga minoritas yang merasa terancam dalam melaksanakan keyakinannya belum ada tindakan nyata yang benar-benar menjamin keamanan dan rasa keadilan dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya.⁹⁹

⁹⁹<http://www.tempo.co/read/news/2010/12/09/178297869/Pemerintah-Tasikmalaya-Diduga-Tahu-Rencana-Penyegelan-Aset-Ahmadiyah>, diakses tanggal 28 September 2013.

BAB V

KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI BEKASI

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya yang dinamis, maka potensi pertentangan, konflik dan kekerasan selalu ada. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan persoalan-persoalan aspek budaya terutama politik, ekonomi dan agama memiliki potensi yang dapat menimbulkan pertentangan (disosiatif). Beberapa peristiwa konflik telah terjadi pada era setelah jatuhnya Soeharto. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya, kasus gerakan separatisme di Timor-Timur, konflik di Aceh, keberadaan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Barat. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya adalah kerusuhan agama antara Muslim dan Kristen di Maluku dan Sulawesi, Kekerasan antar etnik di Kalimantan, kekerasan anti Cina, perilaku kekerasan Muslim yang bersifat militeristik dan geng-geng pemuda.¹⁰⁰

Pertentangan di kalangan umat beragama pun terjadi terutama hubungan antar penganut Islam dan Kristen. Pertentangan kedua penganut ini telah terjadi di Indonesia sejak lama. Persaingan kedua penganut agama ini menyangkut masalah bantuan asing, penyebaran agama dan pendirian tempat ibadah. Konflik berlatar belakang agama banyak terjadi di daerah Jawa Barat. Sebagaimana hasil temuan *the Wahid Institute*¹⁰¹ bahwa sepanjang tahun 2009 wilayah yang sering munculnya kasus-kasus intoleransi; Jawa

¹⁰⁰ David Brown and Ian Wilson. *Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta* (Asia Research Center-Perth Western Australia: Working Paper No.145 July 2007), hlm.2.

¹⁰¹ Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009 (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 14.

Barat 32 kasus (34 %), Jakarta 15 kasus (16 %), Jawa Timur 14 kasus (15 %), dan Jawa Tengah 13 kasus (14 %). Isu yang paling mengancam kehidupan beragama adalah isu yang termasuk dalam kategori penyebaran kebencian yang ditujukan kepada agama tertentu seperti Yahudi dan Kristen, atau kelompok dan individu yang diduga sesat.

Konflik atau kekerasan yang berlatar belakang agama banyak terjadi di Kota Bekasi, karena memiliki tingkat keanekaragaman sosial dan budaya yang dinamis. Beberapa kasus menunjukkan isu yang menjadi masalah terkait bantuan asing, penyebaran agama dan pendirian tempat ibadah. Seseorang yang melakukan aksi kekerasan adalah bentuk kebebasan yang boleh jadi dilegitimasi oleh norma-norma yang diyakininya termasuk oleh norma agama. Dengan demikian, pelaku kekerasan seolah-olah tidak peduli dan membebaskan diri dari hukum dan norma lainnya yang disepakati bersama.

Sejarah, Kondisi Wilayah dan Peta Demografi

Sejarah Singkat Kota Bekasi

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kec. Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, pada saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No. 1 Bekasi.

Pesatnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya meliputi 18 Kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono. Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991, kemudian digantikan oleh Bapak Drs. H Khailani AR hingga tahun 1997.

Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status kotif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.

Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun, selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H. Nonon Sonthanie.

Geografi

Letak geografis Kota Bekasi adalah 106o48'28'' – 107o27'29'' Bujur Timur dan 6o10'6'' – 6o30'6'' Lintang Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km persegi, dengan batas wilayah di sebelah Utara Kabupaten Bekasi, sbelah Selatan

Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat Provinsi DKI Jakarta dan sebelah Timur: Kabupaten Bekasi.

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Air permukaan di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat. Air selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah disekitar Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah di Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24 – 33° C.

Pada tahun 2008 Jumlah Penduduk Kota Bekasi lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan

Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. Kondisi ketenagakerjaan Bekasi seperti tampak pada halaman berikut.

Bagan 5.1. Kondisi Ketenagakerjaan Bekasi 2003-2007

Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bekasi 2003-2007

No	Uraian	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Jumlah Penduduk Bekerja	625.184	651.095	692.189	731.404	840.647
2.	Jumlah Angkatan Pekerja	720.697	755.374	792.189	919.348	921,181
3.	Jumlah Pengangguran	95.513	104.284	102.019	187.944	
4.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	42.988	64.890	51.608	43.472	41.789
5.	Upah Minimum Kota Bekasi (UMK) Kelompok I	631.000	631.000	710.000	824.000	1.020.000
	Upah Minimum Kota Bekasi (UMK) Kelompok II				820.000	1.013.000
	Upah Minimum Kota Bekasi (UMK) diluar Kelompok I & II				795.000	990.000

Ketenagakerjaan

Upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah penanggulangan masalah ketenagakerjaan.

Target dan capaian rasio jumlah penduduk bekerja : penduduk usia kerja

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Pencari Kerja Terdaftar	Pengangguran	Rasio Pddk Bekerja : Usia Kerja
2003	1,322,063	720,697	625,184	42,988	95,513	47,29
2004	1,351,770	755,377	651,090	64,890	104,287	48,17
2005	1,432,449	794,208	692,189	51,608	102,019	48,32
2006	1,497,617	919,348	731,404	43,472	187,944	48,84
2007	1,571,638	921,181	840,647	30,610		53,49

Tingkat partisipasi angka kerja tahun 2005 mencapai 55,44% sedangkan tahun 2007 mencapai 58,61%. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data IPM (Satlak dan BPS tahun 2007) menurun -17,53% dari tahun sebelumnya, dengan perincian tahun 2005 mencapai 12,85 sedangkan tahun 2007 mencapai 8,74%.

Tingkat Partisipasi Angka Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kecamatan di kota Bekasi Tahun 2007

Kecamatan	Tingkat Partisipasi Angka Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Pondok gede	58,87	5,84
Jati sampurna	58,81	1,70
Jati asih	55,04	6,74
Bantar gebang	62,62	12,46
Bekasi Timur	59,33	13,09
Rawa lumbu	60,41	7,90
Bekasi Selatan	57,21	4,74
Bekasi Barat	57,57	8,74
Medan Satria	61,30	9,79
Bekasi Utara	56,60	9,60
Mustika Jaya	67,70	9,79
Pondok Melati	55,71	11,69
Kota Bekasi	58,61	8,74
Tahun 2005	55,44	12,85
Laju 2005-2007	2,82	-17,53

Dibandingkan dengan capaian hasil sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Barat, pencapaian IPM Kota Bekasi melebihi pencapaian IPM

Propinsi Jawa Barat yang mencapai angka 70.48. Kota Bekasi menempati peringkat ketiga IPM di Propinsi Jawa Barat dibawah Kota Depok dan Kota Bandung.

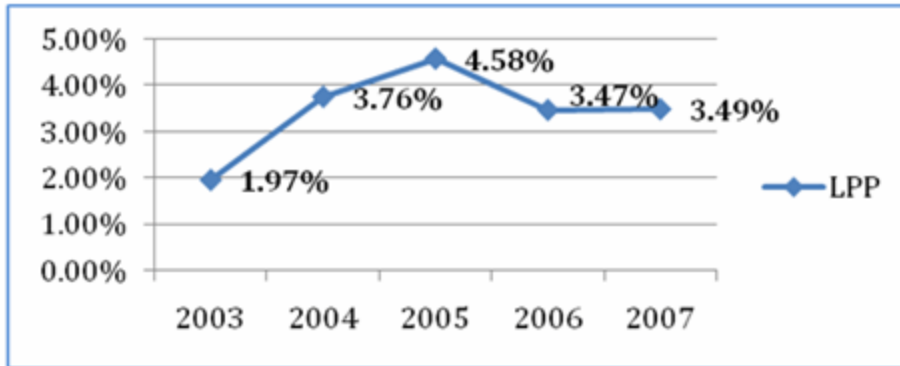
5.2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi

**Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi dan Komponen Pembentuknya
2003 – 2007**

Indeks dan Komponen IPM	2003	2004	2005	2006	2007
Indeks Pembangunan manusia	73.49	74.95	74.48	75.65	75.81
Indeks Pendidikan / IP	88.63	89.61	90.03	90.08	90.11
- Angka Melek Huruf/ AMH (%)	98.12	98.71	98.85	98.86	98.87
- Rerata Lama Sekolah /RLS (tahun)	10.45	10.71	10.86	10.88	10.89
Indeks Kesehatan / IK	72.50	73.97	74.15	74.52	74.98
- Angka Harapan Hidup/ AHH (%)	69.50	73.97	69.49	69.71	69.99
Indeks Daya Beli / IDB	59.32	61.29	61.54	62.34	62.34
- Daya Beli Masyarakat / DBM (Rp-ADHK)*	556.70	565.20	569.38	569.74	569.77

Penduduk Kota Bekasi terdiri dari penduduk asli maupun migran yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk asli yang datang untuk bekerja di Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Laju pertumbuhan penduduk seperti digambarkan pada bagan 5.3. berikut ini:

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007



Konflik atau Kekerasan Berlatar Belakang Agama

Tahun 2008, acara bertajuk “Bekasi Berbagi Bahagia” diselenggarakan Yayasan Mahanaim. Acara ini diduga oleh Ketua MUI Kota Bekasi, KH. Badruzzaman Busyairi, sebagai kegiatan Kristenisasi. Pernyataan ketua MUI sbb: “Yayasan ini tahun kemarin membuat acara Kristenisasi,” Menurut Kepala Kelurahan, kegiatan ini mendapat surat rekomendasi dari Wali Kota. Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran agama di kalangan komunitas Kristen dan Muslim masih menjadi permasalahan, sehingga berpotensi sebagai konflik.

Pada tahun 2008, Pendirian Gereja Albertus menimbulkan permasalahan dalam hubungan antar pemeluk agama Islam dan Kristen. Ahmad Salimin Dani, Ketua DDII Kota Bekasi sekaligus mewakili Ormas Islam se-Kota Bekasi menyatakan sbb: “Banyak penduduk yang mengadu kepada kami, karena telah dipalsukan tanda tangannya untuk mendukung pendirian gereja itu. Padahal mereka tidak merasa menandatangani dan mendukung pendirian gereja,” Salimin Dani menambahkan, bahwa ada oknum-oknum yang mengaku tokoh masyarakat setempat yang mem back up pendirian Gereja Albertus. Oknum tokoh masyarakat yang berjumlah delapan orang tersebut, telah menandatangani

surat pernyataan yang berisi mendukung pendirian Gereja Albertus, setelah menerima sejumlah uang dari panitia gereja. Jumlah tandatangan menunjukkan seolah-olah semua warga mengizinkan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendirian Gereja bagi kelompok Kristen masih dianggap sulit. Salah satu penyebabnya adalah aturah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri atau peraturan Bersama Menteri yang menyebutkan bahwa persyaratan pendirian rumah ibadah harus disetujui sekurang-kurangnya 60 orang.

Pada tahun 2010, diadakan kegiatan karnaval anti-narkoba yang diselenggarakan Badan Narkotika Kota (BNK). Acara dimulai dari Gelanggang Olah Raga (GOR) Bekasi menuju Alun-alun, melewati masjid Al-Barkah, lalu berakhir di Kantor PMI. Saat melintasi depan Masjid Agung Al Barkah, beberapa peserta karnaval berbuat sesuatu yang dianggap menyinggung sebgaiain kelompok Muslim. Mereka merangsek masuk ke halaman masjid. Padahal di dalam masjid kebanggaan umat Islam Bekasi itu sedang berlangsung akad nikah. Seorang qori sedang membacakan tiwalah al-Qur'an. Di halaman masjid mereka membagi-bagikan souvenir bernuansa Kristen kepada siapa pun yang dijumpainya, seraya memuji Yesus. Tak hanya itu mereka juga membawa atribut-atribut Kristen, seperti mahkota dan bendera berlogo bintang david. Rahmat Efendi yang pada saat itu sebagai Wakil Walikota dikenal dekat dengan tokoh-tokoh Islam, menduga kejadian tersebut dirancang secara sistematis sebagai upaya mengadu-domba umat Islam Bekasi. Pasalnya, sebagai Ketua BNK ia mengaku tak pernah memberikan izin pelaksanaan karnaval anti-narkoba menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Menurunya itu artinya panitia karnaval telah mencatut nama BNK.

Pada tahun yang sama (2010), ratusan umat muslim yang berasal dari 16 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menutup paksa aktifitas peribadahan umat kristiani di Gereja Galileo, Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan. Pada tahun 2012, terjadi penusukan terhadap salah seorang pendeta oleh penduduk Ciketing. Beberapa sumber menyebutkan peristiwa ini berkaitan dengan pendirian Gereja yang tidak dikehendaki oleh penduduk setempat.

Pada akhir tahun 2012 terjadi penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan pengeboman dan diduga terorisme, seperti yang dikenal dengan "kasus Jatiasih". Para pelaku tersebut bukan penduduk asli Bekasi. Menurut salah seorang tokoh Ulama Bekasi bahwa orang Betawi tidak ada yang berani melakukan pengeboman apalagi terlibat terorisme. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Luspida Simanjuntak pimpinan jemaat HKBP Pondok Timur Indah (PTI), mengungkapkan jemaatnya semakin tertekan dengan berbagai upaya kekerasan serta penyegelan rumah ibadah. Bahkan pada suatu hari, jemaat gereja tersebut sempat dihalangi beribadah oleh sejumlah massa yang diketuai seorang Ustadz.

Dari beberapa kasus pertentangan atau kekerasan antara kelompok Muslim dan Kristen di Kota Bekasi cenderung disebabkan oleh proses pendirian rumah ibadah, khususnya pendirian Gereja. Disatu pihak, tokoh muslim memahami bahwa pertentangan di kalangan Muslim dan Kristen itu karena proses pendirian Gereja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tokoh-tokoh Muslim menyebutkan bahwa adanya pendirian Gereja yang tidak sesuai prosedur dan aturan dapat menyebabkan pertentangan bahkan kekerasan, walaupun tokoh muslim tidak menghendaki tindakan kekerasan

tersebut. Di lain pihak, beberapa tokoh Kristen mengakui bahwa syarat-syarat pendirian Gereja dianggap memberatkan, terutama syarat keharusan disetujui oleh 60 orang penduduk setempat.

Selain itu salah seorang tokoh Kristen menyebutkan bahwa mendirikan Gereja besar di Kota Bekasi akan mendapatkan kesulitan sekarang ini, berbeda dengan tahun 80-an. Dulu pemukiman penduduk masih sedikit apabila dibandingkan dengan sekarang. Tingkat pemahaman penduduk pribumi masih murni sehingga belum terkontaminasi oleh paham-paham yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya kajian kembali hubungan kelompok Muslim dan Kristen (Katolik dan Protestan). Upaya-upaya akomodasi dari pemerintah bagi masyarakat yang plural perlu terus dilakukan, terutama pemahaman budaya lokal. Perbaikan ekonomi atau kesejahteraan perlu ditingkatkan. Regulasi-regulasi yang mengatur pendirian ibadah (Gereja) bisa diarahkan untuk keadilan dan kebersamaan sebagai warga bangsa. Wawasan keagamaan yang inklusif perlu diterapkan dan nilai-nilai nasionalisme perlu terus dikembangkan.

Latar Belakang Pemilihan Wilayah Penelitian

Secara umum, Bekasi diketahui sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat dengan catatan kekerasan berbasis agama Islam yang panjang. Dimulai dari pelarangan pembangunan dan penyegelan paksa rumah ibadah, hingga penyaniayaan terhadap petinggi agama Nasrani. Isu-isu kekerasan itu pun tidak hanya mengancam umat non-muslim, namun juga mengancam umat minoritas dari aliran agama Islam (Ahmadiyah) yang sepakat tidak diakui keberadaannya oleh MUI. Di Bekasi, wilayah penelitian dilakukan di sebuah kawasan pemukiman daerah Pekayon. Kawasan pemukiman ini

dipilih karena dianggap dapat merepresentasikan kehidupan umat minoritas di Bekasi. Mayoritas warga yang tinggal di pemukiman ini beragama Islam. Terdapat Madrasah Ibtidaiyah/MI Al-Mu'awanah yaitu sekolah Islam setingkat Sekolah Dasar. Di lokasi yang sama juga terdapat pesantren dan masjid yang ukurannya cukup luas. Salah satu ketua MUI tingkat 3 merupakan warga dari kawasan pemukiman ini. Nilai-nilai yang dibentuk dalam lingkungan ini juga terasa masih sangat dipengaruhi oleh hubungan pemuka agama setempat.

Disisi lain, kehidupan warga di kawasan ini cukup plural. Dilihat dari latar belakang suku, agama, dan kewarganegaraan warganya. Beberapa warga yang tinggal bersuku non-Jawa (misalnya Batak), memeluk agama non-Islam (Hindu, Kristen), dan berwarganegara asing (Korea). Tidak jauh dari *MI Al Mu'awanah* juga terdapat *International School* yang memiliki lingkungan sangat multinasional. Di kawasan pemukiman ini juga terdapat Masjid yang menjadi tempat peribadatan kelompok Ahmadiyah. Dari kemajemukan warga inilah, peneliti berupaya melihat kondisi kehidupan umat minoritas melalui perbincangan dengan narasumber. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pandangan kelompok mayoritas terhadap minoritas. Apakah umat minoritas memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas peribadatan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah mereka mendapat perlakuan diskriminasi diluar kegiatan agama. Bagaimana pula umat mayoritas melihat fenomena kekerasan berbasis agama Islam yang seringkali terjadi di Bekasi. Adakah benih-benih kekerasan yang tertanam pada warga yang tinggal disekitar kawasan pemukiman ini, mengingat pula banyaknya usia rentan (anak-anak sekolah) terhadap isu-isu yang sifatnya provokatif. Sejauh apa fanatisme warga mayoritas terhadap ajaran agamanya.

Latar Belakang Kekerasan di Bekasi

Kekerasan berbasis agama Islam di Bekasi dilatarbelakangi oleh *mindset* pemuka agama mayoritas yang masih sempit. Hal itu ditambah dengan pendidikan warga Bekasi yang rendah dan belum merata, serta minimnya komunikasi umat minoritas dengan warga dan pemuka agama mayoritas setempat. Beberapa organisasi Islam seringkali memprovokasi situasi. Masalah lainnya adalah kurangnya pendekatan dari pemuka agama pada masyarakat guna memberi pemahaman terkait kemajemukan warga, dan faktor sejarah.

Terkait dengan *mindset* pemuka agama mayoritas yang masih sempit diketahui melalui wawancara dengan ketua MUI tingkat 3 (kecamatan) yang tinggal di kawasan pemukiman. Diskriminasi terhadap umat minoritas dirasakan dalam pernyataan beliau yang mengungkap kewajaran jika pembangunan rumah ibadah umat Islam lebih mudah dibandingkan dengan umat Nasrani, karena umat Islam adalah umat mayoritas. Sementara, negara sendiri mengakui kemajemukan pemeluk agama di Indonesia. Sudah selayaknya seluruh pemeluk agama mendapat hak yang sama perihal kebebasan melaksanakan dan memenuhi kebutuhan peribadatan.

Beliau juga tidak melihat fenomena ini secara holistik, dari sudut pandang berbagai pihak dengan menyatakan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama di Bekasi sudah jauh lebih baik. Karena, kondisi yang bersinggungan digambarkan oleh seorang warga Bekasi yang menjadi narasumber. Pernyataan beliau hanya didasarkan pada kondisi yang berada di kawasan pemukiman tersebut, dimana beberapa orang asing dan etnis dari luar pulau Jawa yang beragama non-Islam, keberadaannya diterima dengan

baik. Salah satu contoh kerukunan antar umat beragama di Bekasi terdapat di daerah Kampung Sawah. Di lokasi ini berdiri Pesantren *Fisabililah* yang bersebelahan dengan Gereja dan jemaatnya hidup dengan harmonis. Namun, pemberitaan di berbagai media massa terkait fenomena kekerasan yang terus terjadi, tidak dapat menutupi kondisi sebenarnya dan tidak dapat menjadikan daerah percontohan ini sebagai representasi yang tepat dari potret kerukunan antar umat beragama di Bekasi.

Upaya MUI dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Bekasi salah satunya dilakukan melalui pengarahannya secara berkala pada para da'i dalam penyampaian dakwah. Yang diperlukan adalah jangan menyampaikan ajaran-ajaran yang salah dari ketentuan Islam, terlebih menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan). MUI menyadari betul sensitifitas isu-isu yang meliputi kehidupan antar umat beragama di Bekasi.

Keberadaan forum yang bernama FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang menjadi mediator ketika terjadi konflik, dengan penyelesaian melalui forum ini dengan melibatkan masukan dari pemuka-pemuka agama. dalam kehidupan sehari-hari keberadaan warga non-Islam tidak dikucilkan, dan tetap melakukan aktivitasnya dengan normal. Mereka diberikan kebebasan untuk mengadakan acara berkumpul dengan kerabat atau teman-teman, selama tetap melaporkan kegiatan yang akan diselenggarakan. Ijin diberikan selama kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas peribadatan. Karena, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak aman bagi warga, seperti kekhawatiran akan isu Kristenisasi.

Menanggapi maraknya penyegelan dan sulitnya mendapat izin pembangunan gereja di Bekasi, beliau menjelaskan karena pembangunan dilakukan di tanah yang bukan

milik gereja, juga tidak mendapatkan persetujuan masyarakat. Selain itu, jemaat rumah ibadah tidak harus memenuhi kuota yang setidaknya mencapai 60 jemaat. Paling penting, jemaat harus berasal dari daerah pemukiman sekitar. Karena dalam berbagai peristiwa, pemenuhan kuota jemaat dipaksakan dengan membawa warga yang berasal dari luar pemukiman. Mendatangkan orang-orang asing dari luar wilayah pemukiman dianggap mengganggu keamanan warga sekitar. Asal muasal pendatang tidak diketahui dengan jelas sehingga dikhawatirkan dapat memicu konflik berikutnya. Beliau juga menjelaskan, pada kasus-kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah, tidak semata-mata hanya pembangunannya dihentikan/disegel, namun, direlokasikan. Sayangnya, jemaat umumnya tidak menerima pengalokasian pembangunan rumah ibadah tersebut sehingga timbul konflik.

Keberadaan Jemaah Ahmadiyah

Jamaah Ahmadiyah sebagai umat minoritas di Bekasi yang juga kerap dihadapkan pada pelarangan pembangunan rumah ibadah maupun aktivitas peribadatan. KH. R. Cholili selaku ketua MUI tingkat 3 menerangkan bahwa hal itu terjadi karena ajaran Islam yang dianut oleh kelompok Ahmadiyah jelas-jelas telah melenceng dari ajaran agama Islam yang seharusnya. Jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sementara mayoritas umat muslim meyakini Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dalam Islam. Menyikapi keberadaan Ahmadiyah, MUI senantiasa menempuh cara-cara damai untuk membangun kesepakatan dengan kelompok ini. Seperti yang telah disebutkan bahwa di daerah pemukiman ini terdapat masjid yang diduga menjadi tempat peribadatan aliran Islam Ahmadiyah. Belum lama, beliau dan perwakilan

dari MUI berupaya melakukan pendekatan terhadap kelompok ini dengan menawarkan untuk mengisi ceramah di Masjid tersebut. Dilakukan agar ajaran agama yang disampaikan kembali pada ajaran agama Islam yang seharusnya. Waktu untuk melakukan pendekatan juga disepakati kedua belah pihak. Namun kesepakatan tidak tercapai antara kedua belah pihak. Kehadiran MUI di Masjid itu mengalami penolakan, kedatangan mereka tidak disambut, bahkan pagar Masjid digembok.

Perihal tindak kekerasan yang diberitakan menimpa agama minoritas di Bekasi, termasuk kelompok Ahmadiyah, KH. R. Cholili menegaskan MUI tidak terlibat didalamnya. Tindak anarkis dilakukan oleh Forum Pembela Islam (FPI). Sementara, FPI tidak diakui sebagai bagian dari MUI. MUI hanya terdiri dari Islam NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). MUI tidak menghendaki cara-cara anarki dalam menyelesaikan persoalan ini. FPI memang kerap memaksa MUI bahkan Walikota Bekasi untuk membubarkan kelompok Ahmadiyah secara paksa. Tetapi, desakan itu tidak ditanggapi oleh MUI. Meski menolak membubarkan Ahmadiyah dengan cara-cara anarkis, KH. R. Cholili bersama dengan anggota MUI lainnya tetap menginginkan pembubaran kelompok Ahmadiyah. Karena jelas-jelas telah melenceng dari ajaran agama Islam.

Terkait tingkat pendidikan warga Bekasi yang masih belum merata, secara umum dapat dikatakan rendah turut menentukan mental/penerimaan warga terhadap kemajemukan. Bekasi dapat dikatakan sebagai wilayah transisi, banyak pendatang yang berkunjung dan tinggal di wilayah ini. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan mental yang belum terbentuk, warga cenderung terombang ambing dalam menyikapi keragaman gaya hidup, suku, dan agama. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh beberapa

ormas yang kerap memprovokasi keadaan. Ormas-ormas tersebut diantaranya *Front Pembela Islam* (FPI), *Forum Betawi Rempuk* (FBR), *Badan Koordinasi Masyarakat Bekasi* (BKMB), dan *Pemuda Pancasila* (PP).

Kurangnya pendekatan dari pemuka agama dan masyarakat pada warga Bekasi disebutkan berdasarkan pengamatan salah satu narasumber. Warga Bekasi secara umum lebih tunduk pada tokoh agama dan masyarakat daripada pejabat pemerintah setempat. Jika diurutkan posisinya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu terakhir pejabat formal pemerintah. Namun, tidak tampak pendekatan dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat untuk meredam konflik. Juga, cara pandang tokoh agama mayoritas dalam penyelesaian konflik masih berdasarkan kepentingan umat mayoritas. Di Bekasi terdapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diperuntukkan sebagai upaya penyelesaian bagi permasalahan serupa, namun keputusan seringkali bias. Tindaklanjut pasca forum, salah satunya pendekatan pemuka agama terhadap pihak yang berkonflik maupun masyarakat Bekasi tidak dilakukan. Manfaat dan keberadaan forum tidak signifikan. Sebenarnya, untuk menengahi permasalahan ini tokoh masyarakat dapat berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pejabat dan tokoh agama, agar sinergi dari ketiga pihak ini tercipta. Namun, dalam realitanya masih jauh dari harapan.

Faktor pendukung lain dari munculnya fenomena ini karena sikap umat minoritas. Sebagai salah satu contoh, ketidakjujuran sekelompok umat Kristen yang hendak membangun gereja yang menyulut kekecewaan warga dan secara tidak langsung meningkatkan sensitifitas terhadap agama Kristen. Pada satu momen Idul Adha ada sekelompok penganut agama Kristen yang mengadakan acara pembagian daging, dimana syarat untuk mendapatkan kupon itu harus ditukarkan dengan foto kopi KTP warga.

Kumpulan KTP tersebut digunakan sebagai tanda persetujuan dari warga atas pembangunan gereja di wilayah bersangkutan dan diserahkan pada kelurahan setempat. Ketika pihak dari kelurahan mengkonfirmasi persetujuan tersebut pada warga, warga kebingungan dan menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Hal ini memicu kemarahan warga, bukan karena kelompok tersebut akan membangun rumah ibadah, namun karena warga merasa dibohongi. Akhirnya setelah diadakan pertemuan dengan pihak bersangkutan, masyarakat Kristen mengakui kesalahannya dan menjelaskan bahwa hal ini dilakukan karena terlalu takut untuk meminta izin pada warga sekitar. Setelah klarifikasi diproses, tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Sensitifitas terhadap minoritas di Bekasi lebih mengarah pada Kristen Protestan. Karena jumlah pemeluk agama ini masih sedikit terkadang mereka memaksakan pemenuhan kuota jemaat gereja dengan membawa jemaat dari luar. Masalah lainnya bersifat minor, seperti sempitnya lahan parkir rumah ibadah mereka yang mengganggu ketertiban jalan/lalu lintas, turut memancing sensitifitas dan antipati terhadap keberadaan gereja. Sementara, meski termasuk umat minoritas, sensitifitas yang sama tidak dirasakan bagi umat Hindu di Bekasi. Karena, ada faktor sejarah warga Bekasi yang dekat dengan pecinan (kampung orang-orang Cina).

Kesimpulan

Di wilayah barat Indonesia, khususnya Jawa Barat, fraksionalisasi konflik tidak condong ke masalah etno-linguistik (misal Sunda atau Non-Sunda), namun lebih ke masalah lain, yang diyakini oleh kelompok Jakatarub (jaringan kerja antarumat beragama) terutama sekali dikarenakan permasalahan intoleransi agama. Dari Januari hingga Oktober tahun 2012 tercatat sebanyak 315 tindakan pelanggaran kebebasan

beragama dan 214 diantaranya terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal. Koordinator Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama juga menambahkan Jawa Barat adalah provinsi tertinggi dalam kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan umat beragama.

Di Jawa Barat terjadi 66 peristiwa kekerasan pelanggaran kebebasan beragama. Selain kekerasan dalam bentuk fisik juga terdapat diskriminasi dalam bentuk administrasi. Sebagian dilakukan dengan bantuan aparat atau pemerintah.

Secara garis besar terdapat dua hal menjadi latar belakang permasalahan kerukunan umat beragama yang mengakibatkan kekerasan:

- 1) pihak yang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari jika perbedaan doktrin yang menjadi penyebab dari benturan. Setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan aliran ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas aliran agama sendiri dan aliran agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada aliran agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan patokan untuk menilai sesat aliran ajaran agama lawan dan menumbuhkan sikap agresif, kurang toleran dan terkadang fanatic;

- 2) fenomena konflik sosial akibat adanya kelompok radikal yang menggerakkan terjadinya kekacauan melalui upaya provokasi massa. Agenda propaganda untuk menyudutkan ideologi kepercayaan atau mazhab agama kelompok lain merupakan dasar dari gerakan kelompok radikal yang tumbuh kembangnya cukup pesat di Indonesia

umumnya dan Jawa Barat khususnya. Signifikansi yang terjadi dapat dilihat dalam kasus Ahmadiyah baik di Bandung, Tasikmalaya maupun di Bekasi.

Penetapan aliran sesat terhadap paham Ahmadiyah telah dikeluarkan oleh fatwa MUI, kemudian diikuti oleh ormas-ormas Islam. Sikap ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh keputusan pemerintah. Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Nomor: 05/KEP/Munas/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa tersebut ditegaskan lagi dalam MUNAS VII tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: II/MUNAS VII/15/2005 tanggal 28 Juli 2005 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Diantara ormas-ormas Islam yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat adalah: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Yayasan Perguruan Islam sy-Syafi'iyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan beberapa ormas Islam lain. Dari fatwa MUI dan ormas-ormas Islam ini, pemerintah menindaklanjuti dengan berbagai keputusan di antaranya: Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,

dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan pergub ini maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang di provinsi Jabar. Adapun aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan pergub tersebut adalah larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.

Saran bagi kelompok keagamaan terutama yang menentang paham aliran yang berbeda dengan paham yang mereka anut adalah hendaknya tidak bertindak anarkis, segala sesuatunya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Hendaknya ditingkatkan dialog antar umat beragama dalam program yang terpadu dan terarah khususnya di kalangan arus bawah. Hal ini karena di kalangan arus bawahlah sering terjadinya gejolak keagamaan yang disebabkan karena adanya perbedaan paham

Walaupun kekerasan terhadap agama yang terjadi di Jawa Barat hingga saat ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mampu menyebabkan rasa takut kepada aliran agama lain yang ditentang. Berkaitan dengan keresahan warga minoritas yang merasa terancam dalam melaksanakan keyakinannya belum ada tindakan nyata yang benar-benar

menjamin keamanan dan rasa keadilan dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya.

BAB VI

KESIMPULAN

Di wilayah barat Indonesia, khususnya Jawa Barat, fraksionalisasi konflik tidak condong ke masalah etno-linguistik (misal Sunda atau Non-Sunda), namun lebih ke masalah lain, yang Jakatarub (jaringan kerja antarumat beragama) yakini terutama sekali dikarenakan permasalahan intoleransi agama. Dari Januari hingga Oktober tahun 2012 tercatat sebanyak 315 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan 214 diantaranya terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal. Koordinator Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama juga menambahkan Jawa Barat adalah provinsi tertinggi dalam kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan umat beragama. Di Jawa Barat terJADI 66 peristiwa kekerasan pelanggaran kebebasan beragama. Selain kekerasan dalam bentuk fisik juga terdapat diskriminasi dalam bentuk administrasi. Sebagian dilakukan dengan bantuan aparat atau pemerintah.

Secara garis besar terdapat dua faktor permasalahan kerukunan umat beragama yang mengakibatkan kekerasan: 1) pihak yang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari jika perbedaan doktrin yang menjadi penyebab benturan. Setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan aliran ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas aliran agama sendiri dan aliran agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada aliran agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan patokan untuk menilai sesat aliran ajaran agama lawan dan menumbuhkan sikap agresif, kurang toleran dan terkadang fanatik; 2) fenomena konflik sosial akibat adanya kelompok radikal yang

menggerakkan kekacauan melalui upaya provokasi massa. Agenda propaganda untuk menyudutkan ideologi kepercayaan atau mazhab agama kelompok lain merupakan dasar dari gerakan kelompok radikal yang tumbuh kembangnya cukup pesat di Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya. Signifikansi yang terjadi dapat dilihat dalam kasus Ahmadiyah baik di Bandung, Tasikmalaya maupun di Bekasi.

Penetapan aliran sesat terhadap paham Ahmadiyah telah dikeluarkan oleh fatwa MUI, Ormas-ormas Islam yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keputusan pemerintah. Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Nomor: 05/KEP/Munas/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa tersebut ditegaskan lagi dalam MUNAS VII tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: II/MUNAS VII/15/2005 tanggal 28 Juli 2005 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Diantara ormas-ormas Islam yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat adalah: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Yayasan Perguruan Islam sy-Syafi'iyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan beberapa ormas Islam lain. Dari fatwa MUI dan ormas-ormas Islam ini, pemerintah menindaklanjuti dengan berbagai keputusan diantaranya: Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota.

dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan pergub ini maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang. Adapun aktivitas yang dilarang melalui ketentuan pergub tersebut adalah larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.

Saran bagi kelompok keagamaan terutama yang menentang paham aliran yang berbeda dengan paham yang mereka anut adalah hendaknya tidak bertindak anarkis, dan agar segala sesuatunya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, himbuan agar ditingkatkan dialog antar umat beragama dalam program yang terpadu dan terarah khususnya di kalangan arus bawah. Hal ini karena di kalangan arus bawahlah sering terjadinya gejolak keagamaan yang disebabkan karena adanya perbedaan paham

Walaupun kekerasan terhadap agama yang terjadi di Jawa Barat hingga saat ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mampu menyebabkan rasa takut kepada aliran agama lain yang ditentang. Berkaitan dengan keresahan warga minoritas yang merasa terancam dalam melaksanakan keyakinannya belum ada tindakan nyata yang benar-benar

menjamin keamanan dan rasa keadilan yang sesungguhnya dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abbas, Nasir. 2005, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Alba, Richard D. Ethnicity dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta (eds.), *Encyclopaedia of Sociology*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Anonim. 2009. Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009. Jakarta: The Wahid Institute
- Banks dan Banks, *Handbook of Research on Multicultural Education*.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. penerjemah Nining I. Soesilo. Jakarta: UI-Press.
- Budiman, Hikmat. 2009. *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*. Jakarta: Interseksi Foundation.
- Clutterbuck, Richard. 1987. *Kidnap, Hijack and Extortion*. New York: McMillan.
- Djelantik, Sukawarsini. 1999. Teroris Internasional, Aktor Bukan Negara dalam Hubungan Internasional, dalam Andre Pareira (Ed) *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Parahyangan Center for International Studies. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djelantik, Sukawarsini, dkk., 2006. *Faktor-Faktor Pendukung Aksi Terorisme di Jawa Bagian Barat*. Laporan Penelitian, Parahyangan Centre for International Studies (PACIS) Universitas Katolik Parahyangan dengan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Menkopolkam Republik Indonesia. Bandung.
- Djelantik, Sukawarsini. 2011. Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan nasional. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Fair, C. Christine Fair dan Bryan Shepherd, 2006, *Who Support Terrorism? Evidence from Fourteen Muslim Countries, Studies in Conflict and Terrorism*. Routledge: Taylor and Francis Group.
- Hadden, Jeffrey K. dan Anson Shupe. 1989. *Secularization and Fundamentalism Reconsidered*, vol III dari seri *Religion and the Political Order*. New York: Paragon House.
- Hammann, Louis J. dan Harry M. Buck. 1988. *Religious Traditions and the Limits of Tolerance*. Chambersburg: Anima Publication.

- Hendropuspito, D. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius – BPK Gunung Mulia.
- Maslikhah. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*. Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books.
- Manning, M. Lee and Leroy G. Baruth. 1996. *Multicultural education for Children and Adolescents*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nasrudin, Dede A. 2008. *Koreksi Terhadap Pemahaman Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Krueger, A.B dan D.D Laitin. 2003, *Kto Kogo?: A Cross-Country Study of the Origins and Targets of Terrorism*. Mimeo.
- Parekh, Bikhu Parekh. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Reich, Walter, 1990. *The Origins of Terrorism: Psychologies, Theologies, State of Mind*. Cambridge: Woodrow Wilson International Center for Scholars dan Cambridge University Press.
- Rushdie, Salman. 1989. *The Satanic Verses*. New York: Viking Penguin.
- Saidi, Ridwan, dkk. 2010. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI). Jakarta: LPPI.
- Sukma, Rizal. 2003. *Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12*, dalam Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (Editors) *After Bali, The Threat of Terrorism*, World Scientific dan Institute of Defence and Strategic Studies. Singapura.
- Van Bruinessen, Martin (ed). 2013. *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”*, Institute of Southeast Asian Studies. Singapura.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.
- Yaqin, M. Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

Sumber Jurnal

- Anonim. 2010. *Paham Keagamaan Antara Harmoni dan Konflik*. Jurnal Harmoni. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Volume IX No. 33.

- Abadie, Alberto. 2004, *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No. 1085.
- Alesina, Ozler, Roubini, and Swagel. 1996. *Political Instability and Economic Growth*, Journal of Economic Growth. Vol. I. hal. 189-211.
- Brown, David dan Ian Wilson. 2007. *Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta* (Asia Research Center-Perth Western Australia: Working Paper No.145. hlm.2.
- Collier and Hoeffler, 2004. *Greed and Grievance in Civil War*. Oxford Economic Paper. Vol. 56, hal. 563-595.
- Djelantik, Sukawarsini. 2005. *Terorisme dan Media Massa*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol. I, No 1. hal. 14-28.
- Miguel, Stayanath and Sergenti. 2004. *Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach*. Journal of Political Economy. Vol. 112 (4). hal. 725-753.
- Sudrajat, Ajat. 2009. Konflik Agama di Kota Jerusalem: Tinjauan Historis. *Tajdid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan*. Vol. 16 Nomor 2. hlm. 331.

Sumber Majalah

- Anonim. 1989. Majalah *TSM: Teknologi & Strategi Militer*. No. 25. Jakarta.
- Anonim. 2005. *Teroris Baru, Jaringan Lama*, Majalah Tempo, Edisi 17-23 Oktober.
- Jones, Sydney. 2005. *Sayap Keras itu Bernama Thoifah Muqatilah*. Majalah Tempo edisi 17-23 Oktober 2005, hal. 60-63.

Sumber Internet

- Tinjauan Psikologi-Sosial terhadap Perilaku Agresi:
<http://unikunik.wordpress.com/2009/05/03/tinjauan-psikologi-sosial-terhadap-perilaku-agresi/>
- Amelia, Riska. 2012. Prihatin Kekerasan Atas Nama Agama Terus Meningkat. Melalui <www.suakaonline.com/terkini/item/2052-prihatin-kekerasan-atas-nama-agama-terus-meningkat.html> diakses 31 Oktober 2013.
- Anonim. 2008. Aksi Damai Tolak Ahmadiyah Tasikmalaya. Melalui <<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/04/28/aksi-damai-tolak-ahmadiyah-tasikmalaya/>> Diakses pada 31 Oktober 2013.

- Anonim. 2012. Tekanan Ormas Acara Tatto di Mal Festival City Link Batal. Melalui <<http://bandung.okezone.com/read/2012/10/27/526/710067/tekanan-ormas-acara-tatto-di-mal-festival-city-link-batal>> Diakses 2 Oktober 2013.
- Anonim. 2013. Dibalik bentrokan Ahmadiyah di Tenjiwaringin Tasikmalaya. Melalui <<http://sosbud.kompasiana.com/2013/05/13/di-balik-bentrokan-ahmadiyah-di-tenjowaringin-tasikmalaya-555665.html>> Diakses pada 2 Oktober 2013.
- Anonim. 2013. Ahmadiyah Diminta Tinggalkan Simbol Islam. Melalui <<http://www.jpnn.com/m/news.php?id=172953>> Diakses pada 2 Oktober 2013.
- Hasani, Ismail. 2012. Kekerasan yang Berulang. Melalui <<http://www.setara-institute.org/en/content/kekerasan-yang-berulang>>Diakses pada 31 Oktober 2013.
- Herdiana, Iman. 2012. FPI Rusak Toko Berlambang Yahudi. Melalui <<http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/18/21/659399/fpi-rusak-toko-berlambang-yahudi>> Diakses pada 2 Oktober 2013.
- Hosen, Nadirsyah. 2002 . Proses Terpilihnya Abu Bakar . melalui <<http://media.isnet.org/Isnet/Nadirsyah/abubakar.html>.> Diakses pada 31 Oktober 2013.
- International Crisis Group (ICG), Jamaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous, Asia Report N°63 26 Agustus 2003. Melalui <<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1452&l=1>> diakses pada tanggal 19 Maret 2006.
- Limas Sutanto, dalam *Workshop Rencana Aksi Advokasi terhadap Kekerasan bernuansa agama*, diselenggarakan Jaringan Islam Anti Diskriminasi di Lawang Malang, 7-9 Oktober 2005. Lihat : <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.
- Murdian, Glorifikasi, Globalisasi dan Kekerasan Bernuansa Agama, dalam <http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-bernuansa-agama/>, diakses tanggal 19 November 2013.
- Purnama, Fery. 2013. Teroe Masih Terus Hantui Jemaah Ahmadiyah tasik. melalui <<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/07/6/151748/Terror-masih-Terus-Hantui-Jemaah-Ahmadiyah-Tasik>> Diakses pada 2 Oktober 2013.
- Safitri, Ania. 2013. Absennya Toleransi dan Fenomena Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. Melalui <<http://islamlib.com/?site=1&aid=1711&cat=content&title=suara-mahasiswa>> Diakses pada 31 Oktober 2013.

Sudirman, Teten. 2013. Kekerasan Atas Nama Beragama. Melalui <<http://www.kabar-priangan.com/news/detail/9468>> diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

Supriadin, Jayadi. 2010. Pemerintah Tasikmalaya Diduga Tahu Rencana Penyegehan Aset Ahmadiyah. <<http://www.tempo.co/read/news/2010/12/09/178297869/Pemerintah-Tasikmalaya-Diduga-Tahu-Rencana-Penyegehan-Aset-Ahmadiyah>> Diakses pada 2 Oktober 2013.

Supratiwi, Fitri. 2013. Kemenag Kutuk Kekerasan Atas Nama Agama. Melalui <<http://bem-fpp.umm.ac.id/id/nasional-umm-2501-kemenag-kutuk-kekerasan-atas-nama-agama.html>> Diakses pada 2 Oktober 2013.

Thoriq, 2009. Alih Kepemimpinan ala Khulafa' ar Rasyidin. Di dalam Suara Hidayatullah Mei 2009. Melalui < <http://majalah.hidayatullah.com/?p=350>> Diakses pada 31 Oktober 2013.

www.bappedatasikmalayakab.go.id

www.kemendagri.go.id

www.setara-institute.org

www.tasikmalayakota.go.id

www.tasikmalayakota.bps.go.id

www.wahidinstitute.org

